

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
KEBUTUHAN HAJATAN DENGAN PEMBAYARAN
DI BELAKANG
(STUDI KASUS DI DESA TLOGOBOYO BONANG DEMAK)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S-1)
Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah



Oleh :
AIN AINUL HURROH
NIM. 132311135

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. HAMKA (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdri. Ain Ainul Hurroh

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

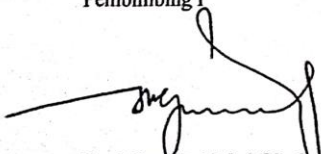
Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Ain Ainul Hurroh
Nim : 132311135
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kebutuhan
Hajatan dengan Pembayaran di Belakang (Studi Kasus
di Desa Tlogoboyo Bonang Demak)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunafasahkan. Atas perhatianya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

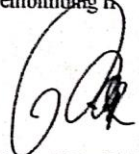
Pembimbing I



Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP. 19670117 199703 1 004

Semarang, 24 Juli 2019

Pembimbing II



Ahmad Munif, M.Si
NIP. 19860306 201503 1 006



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Ngaliyan Kampus III Telp/Fax : 024-7601291
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Ain Ainul Hurroh
NIM : 132311135
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kebutuhan Hajatan dengan Pembayaran di Belakang (Studi Kasus di Desa Tlogoboyo Bonang Demak)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal :

31 Juli 2019

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (SI) tahun akademik 2018/2019.

Ketua Sidang,

Semarang, 01 Agustus 2019
Sekretaris Sidang,

Dr. H. Ali Imron, M.Ag

NIP. 19733073 00312 1 003

Penguji I,

Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag

NIP. 19670117 199703 1 001

Penguji II,

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A

NIP. 19660407 199103 1 004

Pembimbing I

Dr. Mahsun, M.Ag

NIP. 19690830 199403 1 003

Pembimbing II

Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag

NIP. 19670117 199703 1 001

Ahmad Munif, M.SI

NIP. 19860306 201503 1 006



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ (البقرة ٢٨٢)

Artinya; *Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menulisnya dan hendaklah seseorang penulis diantara kamu menuliskanya dengan benar (QS al-Baqoroh: 282). **

*Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Depag RI, 2006, h. 70

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu penulis, Muzammil dan Istiqomah yang telah percaya sepenuhnya kepada penulis untuk menuntut ilmu setinggi mungkin.
2. Adik penulis, Moh. Riza Auliya dan Muhammad Ilham Fahmi
1. Almamaterku Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

DEKLARASI

Penulis menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 Juli 2019

Deklarator



Ain Ainul Hurroh

NIM. 132311135

ABSTRAK

Masyarakat desa Tlogoboyo Bonang Demak yang melaksanakan hajatan banyak yang tidak bisa memenuhi pemenuhan kebutuhannya dikarenakan dana yang dimiliki, masyarakat yang akan melakukan hajatan biasanya melakukan pembelian kebutuhan hajatan kepada toko penjual kebutuhan hajatan dengan cara membayar di belakang setelah acara hajatan selesai karena masyarakat yang hajatan. Bahkan ada beberapa individu yang menawarkan untuk menyediakan berbagai kebutuhan hajatan dengan dibayar di belakang, jika masyarakat yang melakukan hajatan tidak bisa membayar lunas maka kekurangan dari pembayaran tersebut dikenakan tambahan 1%-5% dari kekurangannya ketika nantinya membayar

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Faktor apa sajakah yang melatar belakangi praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak?. 2) Bagaimanakah tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, dengan sumber data primer yaitu dokumen dan wawancara dengan pemilik toko penyedia kebutuhan hajatan, individu masyarakat penyedia hajatan, masyarakat yang melakukan hajatan.. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian di analisis menggunakan metode deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Faktor yang melatar belakangi praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak dilatarbelakangi oleh tiga faktor yaitu faktor ekonomi berupa adanya kebutuhan akan barang untuk hajatan oleh pembeli dan menjual barang hajatan oleh pembeli, sehingga adanya permintaan dan penawaran, faktor sosial berupa adanya sikap saling tolong menolong dan gotong royong diantara masyarakat, dan faktor adat berupa kebiasaan masyarakat yang telah melakukan praktik bertahun-tahun lamanya dan mengikuti praktik yang telah dilakukan saudaranya di masa lalu, praktik ini dilakukan mulai dari pihak pembeli mendatangi penjual untuk membeli kebutuhan hajatan dengan cara pembayaran di belakang, baik ada

yang dengan DP terlebih dahulu lalu kekurangannya setelah hajatan selesai atau tanpa DP sama sekali, jika terdapat sisa barang yang dibeli maka dikembalikan kepada penjual dan dihargai dengan harga modal penjual. 2) Praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak menurut hukum ekonomi syariah adalah sah karena sesuai dengan syarat dan rukun jual beli, namun apabila karena pembelian barang hajatan dengan pembayaran di belakang mengakibatkan adanya tambahan harga dari pada di beli secara kontan, atau adanya kewajiban pembeli untuk menjual hasil hajatan kepada penjual dan adanya tambahan karena tidak membayar setelah hajatan selesai atau karena adanya tunggakan hutang tanpa kesepakatan maka haram hukumnya karena menjerus kepada riba. namun masih ada satu penjual yang tidak memberikan tambahan pembayaran dari harga awal dan tidak mewajibkan penjualan barang siswa hajatan kepadanya dikarenakan pembeli tidak mampu membayar lunas ketika hajatan selesai sesuai kesepakatan awal, maka sah dan diperbolehkan karena tidak ada unsur riba

Kata kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Kebutuhan Hajatan dan Pembayaran di Belakang

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No.0543 b/u/1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditanda tangani pada tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal		zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	z	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrop
ي	ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. Contoh:

نَزَّلَ = nazzala

بِهِنَّ = bihinna

III. Vokal Pendek

Fathah (/) ditulis a, kasrah (/) ditulis i, dan dammah (' _) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ã, bunyi i panjang ditulis î, dan bunyi u panjang ditulis ù, masing-masing dengan tanda penghubung (-) di atasnya. Contoh:

1. Fathah + alif ditulis ã. فَلَا ditulis falã.
2. Kasrah + ya' mati ditulis î. تَفْصِيلٌ ditulis tafşîl.
3. Damamah + wawu mati ditulis ù. أُصُولٌ ditulis uşûl.

V. Fokal Rangkap

VI. Fathah + ya' mati ditulis ai. الزَّهْلِيّٰ

1. Fathah + wawu ditulis au. اَدْوَالَةٌ ditulis ad-daulah.

VII. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis t. Contoh:

المجتهد بداية ditulis Bidayah al-Mujtahid.

VIII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya . Seperti ان ditulis inna.
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (‘). Seperti شيء ditulis syai’un.
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya. Seperti ربائب ditulis rabā’ib.
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (‘). Seperti تأخذون ditulis ta’khuẓūna.

IX. Kata Sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al. البقرة ditulis al-Baqarah.
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah yang bersangkutan. النساء ditulis an-Nisā’.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

ذوى الفروض ditulis zawil furūd atau żawi al-furūd.

اهل السنة ditulis ahlussunnah atau ahlu as-sunnah.

Dalam skripsi ini dipergunakan cara pertama.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum., selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah atas segala bimbingannya.
4. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag, selaku pembimbing I dan Ahmad Munif, M.SI, S.Ag., MM., selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan

dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.

5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Kepala Desa Tlogoboyo Bonang Demak beserta staf-stafnya yang telah memberikan izin untuk dapat melakukan penelitian.
7. Seluruh keluarga besar penulis: Bapak, Ibu, kakak, adik, dan semua keluargaku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kalian semua adalah semangat hidup bagi penulis yang telah memberikan do'a agar selalu melangkah dengan optimis.
8. Kerabat serta saudara-saudariku yang selalu memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-temanku Angkatan 2013 Jurusan muamalah yang tak pernah ku lupakan.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, Juli 2019
Penulis

Ain Ainul Hurroh
NIM. 132311135

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
 BAB I	 PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	5
C. Tujuan Penulisan Skripsi	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	15
 BAB II	 KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM
A. Pengertian Jual Beli	17
B. Dasar-dasar Jual Beli	18
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	23
D. Rukun dan Syarat Akad Jual Beli	26

	E. Macam-Macam Jual Beli.....	32
	F. Hikmah Jual Beli	36
BAB III	PRAKTIK JUAL BELI HAJATAN DENGAN PEMBAYARAN DIBELAKANG DI DESA TLOGOBOYO BONANG DEMAK	
	A. Gambaran Umum Desa Tlogoboyo Bonang Demak.....	38
	B. Praktik Jual Beli Kebutuhan Hajatan di Desa Tlogoboyo Bonang Demak.....	44
	C. Pendapat Tokoh Masyarakat terhadap Praktik Jual Beli Kebutuhan Hajatan di Desa Tlogoboyo Bonang Demak.....	58
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI HAJATAN DENGAN PEMBAYARAN DI BELAKANG DI DESA TLOGOBOYO BONANG DEMAK	
	A. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Praktik Jual Beli Kebutuhan Hajatan Dengan Pembayaran di Belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak	62
	B. Analisis Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kebutuhan Hajatan Dengan Pembayaran di Belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak.....	81

BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	106
	B. Saran-Saran.....	107
	C. Penutup	108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan peradaban kehidupan manusia merealisasikan bentuk perdagangan yang berbeda dalam rangka memenuhi kebutuhan yang berkembang dalam masyarakatnya. Seperti yang terjadi pada masyarakat Desa Tlogoboyo Bonang Demak, sebagai masyarakat pedesaan yang penuh gotong royong dan kebersamaan membutuhkan berbagai macam kebutuhan ketika hajatan baik itu hajatan khitan maupun menikahkan anak-anaknya, modal yang begitu besar ketika melaksanakan hajatan menjadikan pemenuhan kebutuhan tidak bisa dipenuhi dengan dana yang dimiliki, masyarakat yang akan melakukan hajatan biasanya melakukan pembelian kebutuhan hajatan kepada toko penjual kebutuhan hajatan dengan cara membayar di belakang setelah acara hajatan selesai karena masyarakat yang hajatan akan mendapatkan sumbangan dari para tamu untuk membayar. Bahkan di Desa Tlogoboyo Bonang Demak ada beberapa individu yang menawarkan untuk menyediakan berbagai kebutuhan hajatan masyarakat dengan dibayar di belakang, namun harga yang diberikan tidak sebagaimana harga pasar karena dibayar di belakang, biasanya harganya ada lebih dari harga pasar, selain itu ada juga yang harus menjual hasil sumbangan berupa gula atau beras hasil sumbangan kepada yang memberikan kebutuhan hajatan

tersebut dan tidak boleh menjual kepada pihak lain, bahkan jika masyarakat yang melakukan hajatan tidak bisa membayar lunas maka kekurangan dari pembayaran tersebut dikenakan tambahan 1%-5% dari kekurangannya ketika nantinya membayar.

Hal yang paling mendasar yang perlu diperhatikan dalam transaksi jual beli adalah menghindari unsur riba. Seperti kita ketahui, bahwa praktek riba sudah berlangsung jauh sebelum Islam lahir. Sejarah mencatat tidak kurang seperti Plato serta Aristoteles dari Yunani serta Cicero dan Cato dari Romawi begitu mengecam aktivitas ini. Plato berpandangan bahwa riba menyebabkan perpecahan dan menjadi ketidakpuasan di masyarakat. Selain itu menurutnya, riba merupakan alat eksploitasi golongan kaya terhadap golongan miskin. Larangan terhadap riba adalah merupakan suatu tujuan sentral dari semua ajaran moral yang ada pada semua masyarakat.² Riba merupakan pendapatan yang diperoleh secara tidak adil, karena riba sama dengan memerintahkan kepada orang lain supaya mengembalikan jumlah uang lebih tinggi dari yang dipinjamkan. Dengan menetapkan riba berarti seseorang tersebut sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung. Sedangkan semua orang tidak bisa memastikan usaha yang dijalankan akan mendapatkan keuntungan atau tidak.³ Selain itu riba dapat menimbulkan

² Institut Bankir Indonesia, *Bank Syari'ah: Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Djambatan, 2001, h. 45

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Inter Masa, t.th., h. 21

permusuhan dan mengurangi semangat kerja sama dengan sesama manusia.

Hukum islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi *madharat* kepada orang lain. Oleh karena itu mengadakan hukum tukar menukar keperluan antara anggota masyarakat adalah suatu jalan yang adil.⁴ Bagi mereka yang bergerak di bidang perdagangan atau transaksi jual beli, wajib untuk mengetahui hukum yang berkaitan dengan sah dan rusaknya transaksi jual beli tersebut. Tujuannya agar usaha yang dilakukannya sah secara hukum dan terhindar dari hal yang tidak dibenarkan oleh syara'. Banyak kaum muslim yang lalai mempelajari hukum jual beli, melupakannya, sehingga memakan barang haram apalagi terdapat keuntungan dan usahanya meningkat. Sikap tersebut merupakan kesalahan yang fatal serta harus dicegah, agar semua kalangan yang bergerak pada usaha perdagangan mampu membedakan mana yang dibolehkan, berusaha dengan cara yang baik, dan menghindari usaha yang *syubhat* semaksimal mungkin.⁵

Kebanyakan problem sosial yang mengakibatkan pertentangan dan permusuhan adalah disebabkan tidak

⁴ Nadzar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994, h. 57.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Jilid IV, Bandung: Al-Ma'arif, 2001, h. 120

dijalankannya undang-undang syari'at yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Bijaksana dalam hal jual beli. 6 ebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴿٢٧٥﴾

*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah: 275)*⁷

Islam dengan ajarannya melarang praktek riba, karena di dalam riba terdapat unsur pemerasan yang sangat kejam dan dapat menyengsarakan orang lain, terutama bagi pihak penjual dan pembeli. Pengharaman dan pelarangan itu berdasarkan hukum nash-nash yang jelas dan pasti (*qath'i*) baik Al-Qur'an maupun hadits yang tidak mungkin lagi di utak-atik ataupun ditafsirkan secara sembarangan, meskipun berdalih ijtihad atau pembaharuan.

Permasalahan kebiasaan masyarakat Desa Tlogoboyo Bonang Demak dalam jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang apakah terdapat unsur riba atau tidak sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut bagi peneliti dalam penelitian ini, dan peneliti mengkajinya melalui skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kebutuhan Hajatan dengan Pembayaran di Belakang (Studi Kasus di Desa Tlogoboyo Bonang Demak)”**.

⁶ Syeikh Ali Ahmad Jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri' wa Falsafatuhu, terj. Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: Asy-Syifa, 1992, h. 375

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang: Toha Putra, 2006, h. 69

B. Permasalahan

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis sampaikan beberapa permasalahan yang menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini:

1. Faktor apa sajakah yang melatar belakangi praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang melatar belakangi praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran ilmu muamalah yang berkaitan dengan jual beli dengan pembayaran di belakang.

2. Praktis

- a. Bagi masyarakat

Memberikan gambaran kepada masyarakat Desa Tlogoboyo Bonang Demak tentang hukum jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang, sehingga dalam menjalani kegiatan muamalah sesuai dengan syariat Islam.

- b. Bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam

Penelitian ini diharapkan mampu satu kajian baru tentang proses mengkaji hukum Islam terhadap praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini peneliti mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, relevansinya dengan judul skripsi ini yaitu:

1. Penelitian Makmun (2014) yang berjudul "*Praktek Ngebon Jual Beli Tembakau di Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal*".⁸ Hasil Penelitian ini menunjukkan jual beli

⁸ Makmun, *Praktek Ngebon Jual Beli Tembakau di Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2014

tembakau dengan sistem *ngebon*. Sedangkan hasil penelitiannya adalah 1) Praktek *ngebon* jual beli tembakau di Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal adalah dilakukan oleh dua kelompok, yaitu kelompok petani kepada pedagang (*tengkulak*) dan kelompok pedagang (*tengkulak*) kepada juragan (*peniam*). Adapun penggunaan uang “*ngebon*” tersebut bagi petani untuk biaya tembakau atau syarat pemeliharaan. Tapi bagi para pedagang (*tengkulak*) untuk modal membeli tembakau rajangan kepada petani. Adapun faktor-faktor yang menjadi motivasi masyarakat untuk melakukan praktek *ngebon* jual beli tembakau tersebut adalah karena kedua belah pihak saling membutuhkan dan saling mencari keuntungan, menganggap hal yang lumrah, hal ini sudah terjadi sejak lama, karena ketidaksanggupan para petani mencari modal untuk biaya penggarapan sebelum panen, dan untuk modal membeli tembakau yang sudah kering (*rajang*) para petani bagi pedagang (*tengkulak*), karena situasi yang mendesak untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 2) Pendapat sebagian ulama’/tokoh masyarakat di Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal, praktek *ngebon* jual beli tembakau tidak sah, namun apabila akad harga tembakau ditentukan pada waktu tembakau akan ditimbang/setelah ada barangnya boleh atau sah. 3) Praktek *ngebon* jual beli tembakau di Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal tidak sesuai dengan hukum Islam, karena syarat dan rukunnya tidak dapat terpenuhi ‘bagi

para petani', tetapi *ngebon* bagi pedagang kepada sang juragannya adalah sah karena syarat dan rukunnya bisa terpenuhi. Syarat-syarat dan rukun praktek *ngebon* bagi petani yang tidak terpenuhi adalah pada syarat *ma'qul 'alaih*, yaitu barang yang diperjual belikan belum ada barangnya apalagi sifat dan kadar kualitasnya. Maka jual beli dengan sistem *ngebon* tersebut termasuk jual beli *gharar* yang dilarang oleh Islam.

2. Penelitian Muchamidah (2012) yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ngebon Pakaian Konveksi (Studi Kasus di Desa Loram Kulon Jati Kudus)*.⁹ Hasil penelitian menunjukkan Akad *mbageni* dalam jual beli *perbakalan* sesuai dengan hukum Islam dengan indikator barang yang dijual bermanfaat dan suci, akad yang terjadi jelas, dan sistem *mbageni* yang terjadi adalah bentuk cicilan dari utang nelayan, namun apabila itu mengakibatkan pembengkakan harga tanpa kesepakatan maka tidak diperbolehkan. Selain itu utang piutang dan sistem *mbageni* dalam jual beli *perbakalan* telah menjadikan salah satu pihak ada yang dirugikan, seperti pengutang lari dari tanggung jawab, pemberian bagian atau *mbageni* diluar utang yang ditanggung. Orang yang menunda atau tidak membayar utang

⁹ Muchamidah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ngebon Pakaian Konveksi (Studi Kasus di Desa Loram Kulon Jati Kudus)*, Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2012

padahal ia mampu, maka itu termasuk larangan dalam Islam, sedang memberikan tambahan diluar utang termasuk riba.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Miftakhul Laili (2010) yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ngreyeng (Studi Kasus di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)*.¹⁰ Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Proses jual beli *Ngreyeng* di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dilakukan ketika kapal nelayan datang sudah ditunggu oleh “*bakul seret*” atau pengadang kapal atau lebih terkenal dengan calo kapal oleh para nelayan. Selanjutnya si bakul seret menyewa basket pada bakul besar sebagai tempat menaruh ikan, basket itu juga sebagai tolak ukur timbangan harga ikan, kemudian bakul seret menawarkan ikan itu pada bakol, bakol seret bebas untuk mencari bakol mana yang berani membeli ikan dengan harga lebih tinggi, kesepakatan harga tidak terjadi antara pihak kapal dengan bakol tetapi diwakili oleh pengadang dengan pembelayaran di belakang, konsekuensinya pengadang mendapat upah Rp. 2000,- per basket. Tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pembayaran dalam proses jual beli *ngreyeng* di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak adalah boleh karena

¹⁰ Miftakhul Laili, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ngreyeng (Studi Kasus di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2010

sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli, namun ketika ada unsur pembohongan dan riba maka Islam melarangnya dengan keras.

Beberapa penelitian di atas terdapat kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu masalah jual beli dengan pembayaran di belakang dari sudut hukum dan maslahatnya, akan tetapi penelitian yang peneliti lakukan lebih mengarah kepada tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak yang tentunya berbeda dengan penelitian diatas karena pada penelitian ini bentuk proses, dampaknya dan kandungan hukumnya berbeda dengan penelitian diatas.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) berbentuk kualitatif yaitu penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya dengan tidak merubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan sehingga *natural setting* dalam penelitian ini peneliti menggambarkan peristiwa maupun kejadian yang ada di lapangan tanpa mengubahnya menjadi angka maupun simbol.¹¹ Penelitian

¹¹ Hadari Nawawi dan Nini Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996, h. 174.

lapangan berbentuk kualitatif dilakukan karena berusaha memotret gambaran praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis empiris atau sosiologi hukum.¹² Yuridis empiris atau sosiologi hukum merupakan suatu pendekatan yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat diketahui dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tlogoboyo Bonang Demak.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

- a. Sumber data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian.

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, h. 13

Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.¹³ Sumber primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara pemilik toko penyedia kebutuhan hajatan, individu masyarakat penyedia hajatan, masyarakat yang melakukan hajatan.

- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. ¹⁴ Dalam penelitian ini penulis lebih mengarahkan pada data-data pendukung dan alat-alat tambahan yang dalam hal ini berupa data tertulis, yaitu data-data dari kelurahan atau desa, majalah ilmiah, sumber data dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Dalam aplikasinya hal ini dapat berbentuk buku-buku terkait dengan jual beli dan jual beli dengan pembayaran di belakang.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, ada beberapa metode yang digunakan antara lain:

a. Metode Wawancara

Wawancara yang sering juga disebut interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara

¹³ Joko P Subagyo *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, h. 87

¹⁴ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, h.

(*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewed*).¹⁵ Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti informan diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun.¹⁶

Pihak yang diwawancari adalah pemilik toko penyedia kebutuhan hajatan, individu masyarakat penyedia hajatan, masyarakat yang melakukan hajatan untuk memperoleh data tentang praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang di Desa Tlogobooyo Bonang Demak.

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti informan diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun.¹⁷

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, h. 132

¹⁶ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005, h. 23

¹⁷ *Ibid.*,.

metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, catatan harian, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan sebagainya.¹⁸ Dokumentasi ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data mengenai keadaan di Desa Tlogoboyo Bonang Demak, dapat berupa peta, data penduduk, buku dan sebagainya.

6. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.¹⁹ Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat ditemukan tema, dan ide kerja seperti yang disarankan data.²⁰

Untuk memperjelas penulisan ini maka peneliti menetapkan metode analisis deskriptif yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, h. 135

¹⁹ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2010, h. 7

²⁰ *Ibid.*, h. 103

bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi.²¹

Analisis ini peneliti gunakan untuk menganalisis praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak dan analisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan penelitian ini terdiri atas 5 bab, di mana dalam setiap bab terdapat sub –sub pembahasan:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI JUAL BELI

Bab ini meliputi Pengertian jual beli, dasar-dasar jual beli, syarat-syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli, dan hikmah jual beli.

BAB III : JUAL BELI KEBUTUHAN HAJATAN DENGAN PEMBAYARAN DI BELAKANG DI DESA TLOGOBOYO BONANG DEMAK.

Bab ini meliputi pertama, gambaran umum Desa Tlogoboyo Bonang Demak meliputi keadaan

²¹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, h. 6-7.

geografis, keadaan ekonomi dan keadaan sosial agama, kedua praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak.

BAB IV : ANALISIS JUAL BELI KEBUTUHAN HAJATAN DENGAN PEMBAYARAN DI BELAKANG DI DESA TLOGOBOYO BONANG DEMAK

Bab ini merupakan pokok dari pembahasan yakni analisis faktor yang melatarbelakangi praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak dan analisis tinjauan ekonomi syariah terhadap praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak.

BAB V : PENUTUP

Meliputi kesimpulan, saran dan kata penutup.

BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, maka kata *al-bai'* berarti “jual”, tetapi sekaligus juga berarti “beli”.²²

Menurut Sayyid Sabiq, jual beli dalam pengertian *lughawi* adalah Saling menukar (pertukaran).²³ Sedangkan menurut Hamzah Ya'qub, jual beli menurut bahasa berarti menukar sesuatu dengan sesuatu.²⁴

Dalam kitab Kifayatul Akhyar, jual beli menurut bahasa adalah:

٢٥
إعطاء شيء في مقابلة شيء

Artinya: “Memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu)”.

²² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, h. 827

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Darul Fikr, t.th, h. 126

²⁴ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*, Bandung: CV. Diponegoro, 1992, h. 18

²⁵ Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhamad Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz I, Semarang: PT. Karya Toha Putra, t.th., h. 239

Adapun pengertian Jual beli menurut istilah (*terminologi*) ada beberapa pendapat, antara lain:

1. Menurut Taqiyuddin:

٢٦
مقابلة مال قابلين للتصرف بايجاب وقبول على الوج الماءذون ه فيه

Artinya: “*Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharuf) dengan ijab dan qabul dengan cara yang sesuai dengan syara’.*”

2. Menukar barang atau milik atas dasar suka sama suka.²⁷

3. Menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (*aqad*).²⁸

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.²⁹

B. Dasar-dasar Jual Beli

Jual-beli yang disyari’atkan Islam, mempunyai dasar-dasar hukum sebagai berikut:

²⁶ *Ibid.*, h. 239

²⁷ Hamzah Ya’qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*, h. 18

²⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta: AT-Tahiriyah, t.th., h. 268

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 68

1. Al-Qur'an

- a. Firman Allah SWT. terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقره : ٢٧٥)

Artinya : *“Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”.* (QS. al-Baqarah: 275)³⁰

Dari ayat tersebut di atas, sudah jelas bahwa Allah swt menghalalkan jual-beli dan tidak menghendaki adanya riba di masyarakat, karena Allah mengharamkan riba.

- b. Firman Allah SWT. terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian.”*³¹

Sayyid Quthb dalam tafsirnya *Fi Zilalil Qur'an* mengemukakan bahwa Allah SWT menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba, karena tidak adanya unsur-unsur

³⁰ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI., 2013, h. 69.

³¹ *Ibid.*, h. 122.

kepandaian, kesungguhan dan keadaan alamiah dalam jual-beli dan sebab-sebab lain yang menjadikan perniagaan pada dasarnya bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sedangkan, perbuatan riba pada dasarnya merusak kehidupan manusia, Islam telah mengatasi keadaan-keadaan yang terjadi pada masa itu dengan pengobatan yang nyata, tanpa menimbulkan gejolak ekonomi dan sosial.³²

A. Musthafa al-Maraghi dalam tafsirnya *Al-Maraghi* menyatakan bahwa, memakan harta dengan cara yang batil adalah mengambil tanpa keridhaan dari pemilik harta atau menafkahkan harta bukan pada hakiki yang bermanfaat, maka termasuk dalam hal ini adalah lotre, penipuan di dalam jual-beli, riba dan menafkahkan harta pada jalan yang diharamkan, serta pemborosan dengan mengeluarkan harta untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh akal. Harta yang haram biasanya menjadi pangkal persengketaan di dalam transaksi antara orang yang memakan harta itu menjadi miliknya.³³

2. Sunnah

Agama Islam mensyari'atkan jual-beli dengan sah, terbukti adanya dasar yang terdapat dalam nash al-Qur'an sebagaimana telah diterangkan di muka. Selain nash al-Qur'an

³² Sayyid Quthb, *Tafsir fi Dzhalil Qur'an*, Jilid I, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, h. 383.

³³ A. Musthafa al-Maraghi, *Terj. Tafsir al-Maraghi*, Juz V, Semarang: Toha Putra, 2003, h. 24-25.

Nabi Muhammad Saw, juga menyebutkan dalam haditsnya. Beliau pernah ditanya oleh seseorang, “apakah usaha yang paling baik”, maka jawab beliau:

عن رفاع بن رافع رضى الله عنه انّ النبيّ صلى الله عليه وسلم سئل: أيّ اكاسب أ طيب ؟ قال "عمل الرجل بيده, وكل بيع مبرور" (رواه البزّاء وصححه
الحاكم) ٣٤

Artinya : “Dari Rifa’ah bin Rafi’ r.a sesungguhnya Nabi Muhammad Saw. pernah ditanya oleh seseorang, usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: usaha manusia dengan tangannya sendiri dan setiap jual-beli yang halal”.

Hadits Nabi Saw. tersebut menerangkan bahwa manusia harus berusaha mencari rizkinya sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Jika usahanya itu berupa jual-beli, maka jual-beli itu harus halal tanpa ada unsur penipuan.

سليمان بن حرب حدّثنا شعبة عن قتادة عن صالح ابى الخليل عن عبد الله بن الحرث رفعه الى حكيم بن حزام رضى الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا اوقال حثيثفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا محقت بركة بيعهما (رواه البخاري) ٣٥

Artinya: “Sulaiman bin Harbi menceritakan kepada kita Syu’bah dari Qatadah dari Sholih Abi Kholil dari Abdillah bin Harts Rafa’ah kepada Hakim bin Hizam r.a berkata, Rasulullah Saw. bersabda: “Dua orang yang berjual-beli menggunakan hak

³⁴ Al-Hafid Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Mesir: an-Nasr Sirkah an-Nur Asia, t.th, h. 158.

³⁵ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, h. 10.

memilih selama belum berpisah. Jika keduanya jujur dan memberi keterangan (benar), niscaya keduanya diberi berkah dalam jual-belinya itu. Dan jika keduanya menyembunyikan (keadaan sebenarnya) dan berdusta, niscaya berkah keduanya itu dibinasakan". (HR. Bukhari)

Hadits tersebut menerangkan bahwa setiap orang yang melakukan transaksi jual-beli hendaklah jujur dan tidak boleh menyembunyikan apapun dari jual-beli tersebut dan tidak boleh berdusta.

3. Ijma'

Ijma' merupakan kesepakatan beberapa ahli *istihsan* atau sejumlah mujtahid umat Islam setelah masa Rasulullah Saw. tentang hukum atau ketentuan beberapa masalah yang berkaitan dengan syari'at atau suatu hal.³⁶

Menurut pendapat ulama-ulama *jumhur*, *ijma'* menempati tempat ketiga sebagai sumber hukum syari'at Islam, yaitu suatu permufakatan atau kesatuan pendapat para ahli muslim yang muslim yang mujtahid dalam segala zaman mengenai sesuatu ketentuan hukum syari'at.³⁷

Adapun landasan *ijma'* ummah tentang jual-beli : ummat sepakat bahwa jual-beli dan penekanannya sudah

³⁶ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, h. 18.

³⁷ Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, Bandung: al-Ma'arif, 2000, h. 121.

berlaku sejak zaman Rasulullah Saw, perbuatan itu telah dibolehkan oleh Rasulullah Saw.³⁸

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Adapun rukun jual beli menurut Sulaiman Rasjid, yaitu:³⁹

1. Penjual dan pembeli

Syaratnya:

- a. Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- b. Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa atau suka sama suka).
- c. Keadaannya tidak mubazir (pemboros) karena harta orang yang mubazir itu di tangan walinya.
- d. Baligh, anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil, karena kalau tidak diperbolehkan sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran. Sedang agama Islam sekali-kali tidak akan mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.

2. Uang dan benda yang dibeli

Syaratnya yaitu:

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 127.

³⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, h. 269

- a. Suci. Barang yang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum dimasak.
 - b. Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan (memboroskan) harta yang dilarang oleh Allah.
 - c. Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada di tangan yang merampasnya, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya.
 - d. Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya atau yang mengusahakan.
 - e. Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli tentang zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antar keduanya tidak terjadi kecoh mengecoh. Yang wajib diketahui zatnya bila barang itu tertentu kadarnya.⁴⁰
3. Lafal (*ijab* dan *qabul*)

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat dilihat pada saat akad berlangsung. Adapun syarat dalam *ijab* dan *qabul* adalah:

⁴⁰ *Ibid*, h. 170

- a. Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal (jumhur ulama) atau telah berakal (ulama mazhab Hanafi)
- b. *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Contohnya: “saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu”, lalu pembeli menjawab: “saya beli dengan harga sepuluh ribu”.
- c. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.⁴¹

Disamping syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, ulama fikih juga mengemukakan beberapa syarat yang lain, yaitu: ⁴²

- a. Syarat sah jual beli

Ulama fikih menyatakan, bahwa suatu jual beli baru dianggap sah, apabila terpenuhi dua hal: *Pertama*, jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Begitu juga harga tidak jelas, jual beli mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak. *Kedua*, apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak dapat

⁴¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 120

⁴² *Ibid.*,.

dikuasai pembeli setelah surat menyurat diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.

b. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli

Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Akad jual beli tidak dapat dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad itu tidak memiliki kekuasaan secara langsung melakukan akad.

c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli

Ulama fikih sepakat bahwa jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli terbebas dari segala macam khiyar yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Apabila jual beli itu masih mempunyai hak khiyar, maka jual beli itu belum mengikat dan masih dapat dibatalkan.

D. Rukun dan Syarat Akad Jual Beli

1. Rukun Akad

Dalam buku Muhammad Amin Suma dijelaskan: rukun (Arab, *rukun*), jamaknya *arkan*, secara harfiah antara lain berarti tiang, penopang dan sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur dan elemen. Sedangkan syarat (Arab, *syarth* jamaknya *syara'ith*) secara literal berarti pertanda, indikasi dan memastikan. Dalam istilah para ahli hukum Islam, rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingatkan eksisnya

sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subyek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (*al-maushuf*) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati). Adapun syarat, menurut terminologi para fuqaha seperti diformulasikan Muhammad Al-Khudlari Bek, (seperti yang dikutip Muhammad Amin Suma), ialah: "Sesuatu yang ketidakadaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri." Yang demikian itu terjadi, kata Al-Khudlari, karena hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum.⁴³

Dalam syari'ah, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara definisi, rukun adalah "suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu".⁴⁴

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat dua orang atau lebih, berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi

⁴³ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, h. 95

⁴⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 2006, h. 1510

kedua belah pihak hak dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad.⁴⁵ Adapun rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:

- a. *'Aqid* ialah orang yang berakad dan terlibat langsung dengan akad, misalnya: penjual dan pembeli.
- b. *Sigat 'aqad* yakni ijab dan qabul.
- c. *Mahal al-'Aqd* atau *al-Ma'qud 'alaih*.⁴⁶

Mahal al-'Aqd atau *al-Ma'qud 'alaih* adalah sesuatu yang dijadikan obyek akad. Adapun obyek akad ini fuqaha menetapkan lima syarat yang harus dipenuhi oleh obyek akad.

- 1) Obyek akad harus ada ketika berlangsung akad.

Berdasarkan syarat ini barang yang tidak ada ketika akad tidak sah dijadikan obyek akad. Namun ada perbedaan pendapat tentang akad atas barang yang tidak tampak. Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah melarang secara mutlak berbagai urusan atau barang yang tidak tampak, kecuali dalam beberapa hal, seperti upah mengupah dan menggarap tanah. Ulama Malikiyah hanya menetapkan pada akad yang sifatnya saling menyerahkan *mu'awadah* dalam urusan harta, sedang yang bersifat *tabarru'* mereka tidak mensyaratkannya.

- 2) Obyek akad harus sesuai dengan ketentuan syara'

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 46

⁴⁶ Rachmad Syafii, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006, h. 45.

- 3) Dapat diserahkan ketika akad berlangsung.
- 4) Obyek akad harus diketahui oleh pihak '*aqid*
- 5) Obyek akad harus suci.⁴⁷

Menurut ulama Hanafiyah rukun akad hanya satu yaitu, *sigat* akad yang terdiri dari ijab dan qabul.⁴⁸

Pembahasan pada unsur-unsur rukun akad ini bahwa keseluruhan fuqaha sepakat, akan tetapi perbedaannya terletak pada unsur obyek akad yang terdapat pada syarat yang kelima, yaitu pada kesucian obyek akad, ulama Hanafiyah mengatakan hal ini tidak termasuk ke dalam persyaratan obyek akad.⁴⁹

2. Syarat-Syarat Akad

Definisi syarat adalah "sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada".⁵⁰

Berdasarkan unsur akad yang telah dibahas sebelumnya ada beberapa konsekuensi hukum dalam macam syarat-syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sah, syarat memberikan dan syarat keharusan *luzum*.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 59-60.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 45.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 61.

⁵⁰ Gemala Dewi dan Widyaningsih, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Grop, 2005, h. 50

a. Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara', jika tidak memenuhi maka batal, syarat ini ada dua bagian: *Pertama*, umum yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad. *Kedua*, khusus yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.

b. Syarat sah

Syarat sah adalah syarat yang ditetapkan oleh syara' yang berkenaan untuk menerbitkan atau tidak adanya akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad. Jika tidak dipenuhi akadnya menjadi fasid (rusak). Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemadaratan dan syarat-syarat jual beli rusak.⁵¹

c. Syarat pelaksanaan akad

Dalam pelaksanaan akad ada dua syarat yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas untuk beraktifitas dengan apa-apa yang dimilikinya dan sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam bertasaruf sesuai dengan

⁵¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 64-65

ketentuan syarat, baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya sendiri maupun sebagai pengganti atau menjadi wakil seseorang.⁵²

d. Syarat kepastian hukum *luzum*

Dasar dalam akad adalah kepastian dan ini suatu syarat yang ditetapkan oleh syara' berkenaan kepastian sebuah akad. Di antaranya syarat *luzum* dalam jual beli adalah terhindarnya dari beberapa *khiyar* jual beli, seperti *khiyar* syarat, *khiyar 'aib* dan lain-lain.⁵³

Pada pelaksanaan seperti melakukan suatu transaksi harus berlandaskan pada persyaratan akad, hal ini sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tertera pada syarat di atas.

Adapun secara umum suatu syarat yang dinyatakan sah adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati
- 2) Harus sama *rida* dan ada pilihan
- 3) Obyeknya harus jelas.⁵⁴

Begitu pula halnya tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam

⁵²*Ibid.*, h. 65

⁵³*Ibid.*, h. 65-66

⁵⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 2-3

perjanjian tersebut, namun demikian pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila:

- a. Jangka waktu perjanjian telah berakhir.
- b. Salah satu pihak menyimpang dari apa yang diperjanjikan.
- c. Jika ada bukti kelancangan dan bukti penghianatan (penipuan).⁵⁵

E. Macam-macam Jual Beli

Menurut Imam Taqiyuddin, jual beli dibagi menjadi tiga yaitu: jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan jual beli benda yang tidak ada.⁵⁶ Para ulama membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk yaitu:⁵⁷

1. Jual beli shahih

Jual beli dikatakan shahih apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun, dan syarat yang ditentukan. Namun jual beli yang sah dapat juga dilarang dalam syariat bila melanggar ketentuan pokok seperti: menyakiti si penjual atau pembeli, menyempitkan gerakan pasar, merusak ketenteraman umum.⁵⁸

⁵⁵ *Ibid*, h. 4

⁵⁶ Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhamad Husaini, *Kifayatul Akhyar*, h. 239

⁵⁷ Gemala Dewi, *et.al.*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005, h. 105

⁵⁸ *Ibid*

2. Jual beli batal

Jual beli menjadi tidak sah (batal) apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu dasar dan sifatnya tidak sesuai dengan syarat seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual dilarang syariat. Adapun yang termasuk jual beli batal, yaitu:⁵⁹

a. Jual beli sesuatu yang tidak ada (*bai' al-ma'dum*).

Yang termasuk jual beli ini misalnya adalah memperjualbelikan buah-buahan yang baru berkembang (mungkin jadi buah atau tidak), atau menjual anak sapi yang masih dalam perut.

b. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan pada pembeli (*bai' ma'juzi at taslim*).

Yang termasuk jual beli ini misalnya adalah menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fikih (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah).

c. Jual beli yang mengandung unsur tipuan.

Yang termasuk Jual beli seperti ini adalah menjual barang yang kelihatannya baik tetapi dibaliknya terlihat tidak baik.

⁵⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 128 -134

d. Jual beli benda najis.

Seluruh fuqaha sepakat bahwasanya jual beli bangkai, khamer dan babi adalah batal atau tidak sah. Namun mengenai benda-benda najis yang tidak disebutkan tadi (bangkai, khamer dan berhala) para fuqaha berbeda pendapat. Menurut mazhab Hanafiyah dan Dhahiriyyah, benda najis yang bermanfaat sepanjang tidak untuk dimakan sah diperjualbelikan seperti kotoran. Hal ini seperti kaidah umum yang populer dalam mazhab:

ان كل مافيه منفعة تحل شرعافان يبيعه يجوز⁶⁰

Artinya: *“Segala sesuatu yang mengandung manfaat yang dihalalkan oleh syara’ boleh diperjualbelikan”*.

Sementara jumhur ulama berpendapat bahwa setiap benda yang najis tidak boleh diperjualbelikan. Ini dikarenakan jumhur ulama memegang prinsip kesucian benda.

e. Jual beli *al-Urbun*

Yaitu menjual suatu barang dengan lebih dulu membayar panjar kepada pihak penjual (sebelum benda diterima). Dengan ketentuan ini jika jual beli jadi dilaksanakan, uang panjar itu dihitung sebagian dari harga, dan jika pihak pembeli mengundurkan diri, maka uang

⁶⁰ Gufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafinfo Persada, 2002, h. 134.

panjar itu menjadi milik penjual. Jumhur ulama berpendapat jual beli dengan panjar seperti ini tidak sah, berdasarkan hadits rasulullah. Dalam jual beli ini juga terdapat unsur *gharar* (ketidakpastian) dan berbahaya, serta masuk kategori memakan harta orang lain tanpa pengganti. Sementara ulama Hambali dan sebagian ulama Hanafi membolehkan dengan syarat adanya batas waktu tunggu untuk melangsungkan atau tidak melanjutkan jual beli tersebut.

- f. Memperjualbelikan hak bersama umat manusia (kepemilikan kolektif) dan tidak boleh diperjualbelikan. Misalnya, air sungai, air danau, air laut dan yang tidak boleh dimiliki seseorang.

3. Jual beli Fasid.

Ulama Hanafi membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli batal. Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli benda-benda haram. Apabila kerusakan itu pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan *fasid*. Namun jumhur ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut.

Fasid menurut jumhur ulama merupakan sinonim dari batal yaitu tidak cukup dan syarat suatu perbuatan. Hal ini berlaku pada bidang ibadah dan muamalah. Sedangkan ulama mazhab Hanafi membedakan antara *fasid* dalam ibadah dan

muamalah. Pengertian dalam ibadah sama pendirian mereka dengan ulama-ulama lainnya (jumhur ulama). Sedangkan dalam bidang muamalah, *fasid* diartikan sebagai tidak cukup syarat pada perbuatan. Menurut mazhab Syafi'i, *fasid* berarti tidak dianggap atau diperhitungkan suatu perbuatan sebagaimana mestinya, sebagai akibat dari ada kekurangan (cacat) padanya. Dengan demikian sesuatu yang telah dinyatakan *fasid* berarti sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntutan atau maksud syara'. *Fasid* dengan pengertian ini, sama dengan batal menurut mazhab Syafi'i. Akad yang *fasid* tidak membawa akibat apa pun bagi kedua belah pihak yang berakad. Menurut Imam Hanafi muamalah yang *fasid* pada hakikatnya atau esensinya tetap dianggap sah, sedangkan yang rusak atau tidak sah adalah sifatnya.⁶¹

F. Hikmah Jual Beli

Syari'at Islam membicarakan tentang manfaat dan hikmah yang besar dalam hubungan antara sesama umat manusia. Apabila ketentuan-ketentuan yang mengatur jual beli dipatuhi baik oleh pembeli maupun penjual akan dapat menimbulkan dampak positif bagi kedua belah pihak, antara lain:

1. Masing-masing pihak merasa puas, dengan adanya kesepakatan dan kepuasan diantara penjual dan pembeli, memiliki suatu nilai dan dikemudian hari tidak akan adanya sesuatu yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak.

⁶¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 128 -134

2. Penjual dan pembeli yang berlapang dada ketika mengadakan tawar menawar akan mendapat rahmat Allah, dan dilihat dari berbagai pembahasan, ada teori dari sementara ahli jiwa mengatakan bahwa keinginan marah itu harus di perturutkan sebagai penyaluran dari suatu dorongan alami yang kalau dibanding akan merusak jiwa.
3. Dengan adanya jual beli akan menjauhkan orang dari memakan dan memiliki harta dengan cara bathil (tidak benar).
4. Manfaat jual beli untuk nafkah keluarga

Keuntungan dan laba bisnis dari seseorang muslim dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dalam memenuhi nafkah keluarga. Memberi nafkah kepada keluarga dengan ikhlas termasuk shadaqah. Untuk melaksanakan kewajiban memberi nafkah kepada keluarga, andang dan papan, ialah dengan jalan usaha mencari rizqi antara lain melalui jual beli.⁶²

⁶² Departemen Agama RI, *Fiqh*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Agama, 2000, h. 18-19

BAB III

JUAL BELI HAJATAN DENGAN PEMBAYARAN DI BELAKANG DI DESA TLOGOBOYO BONANG DEMAK

A. Gambaran Umum Desa Tlogoboyo Bonang Demak

1. Letak Fisiografis

a. Letak Astronomi

Letak astronomi adalah letak suatu wilayah I muka bumi di lihat dari garis lintang dan garis bujur. Berdasarkan letak astronomisnya Desa Tlogoboyo Bonang Demak termasuk wilayah kecamatan Bonang Kabupaten Demak dengan letak astronomis $6^{\circ}48'20''$ - $6^{\circ}50'20''$ LS dan $116^{\circ}32'10''$ - $116^{\circ}33'15''$ BT. Batas Wilayah Desa Tlogoboyo adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tridonorejo
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Karangrejo
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa jatirogo
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Gebang.⁶³

b. Letak Administrasi

Secara administrasi wilayah Desa Tlogoboyo terdiri dari 4 RW 24 RT. Desa Tlogoboyo berada pada tengah kecamatan Bonang.⁶⁴

⁶³ Dokumentasi profil Desa Tlogoboyo Bonang Demak, yang di kutip pada tanggal 22 Mei 2019

⁶⁴ Dokumentasi profil Desa Tlogoboyo Bonang Demak, yang di kutip pada tanggal 22 Mei 2019

c. Letak Klimatologi

Letak klimatologi adalah letak suatu tempat atau wilayah berdasarkan keadaan iklimnya di permukaan bumi. Berdasarkan letak klimatologinya desa Tlogoboyo berada di dataran rendah dengan ketinggian tanah 0 – 2 m dari permukaan air laut, dengan curah hujan 250 mm / tahun.

Dengan demikian temperatur desa Tlogoboyo berdasarkan garis lintang dan garis bujur termasuk beriklim tropis.⁶⁵

2. Letak Sosiografis

Kegiatan masyarakat di Desa Tlogoboyo adalah mayoritas petani dan kegiatan bisnis yang terkait dengan pertanian, juga kegiatan – kegiatan ekonomi yang lain.

Kondisi sosial ekonomi Desa Tlogoboyo adalah:

- a. Jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin
- b. Kondisi penduduk menurut agama
- c. Kondisi penduduk menurut mata pencaharian
- d. Kondisi penduduk menurut tingkat pendidikan.⁶⁶

Adapun secara rinci dapat peneliti gambarkan sebagai berikut:

⁶⁵ Dokumentasi profil Desa Tlogoboyo Bonang Demak, yang di kutip pada tanggal 22 Mei 2019

⁶⁶ Dokumentasi profil Desa Tlogoboyo Bonang Demak, yang di kutip pada tanggal 22 Mei 2019

- a. Jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin

Susunan penduduk berfungsi sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah setempat. Penduduk merupakan sumber tenaga kerja yang ditentukan struktur penduduk, kemampuan individu dan kualitas individunya. Pertumbuhan penduduk yang cepat dalam komposisi penduduk usia muda menyebabkan adanya tuntutan pelayanan kesehatan, pendidikan dan lain – lain.⁶⁷

Susunan penduduk menurut umur adalah pengelompokan penduduk berdasarkan umur tertentu sedangkan susunan penduduk menurut jenis kelamin adalah pengelompokan penduduk laki – laki dan perempuan. Komposisi penduduk Desa Tlogoboyo Bonang Demak berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:⁶⁸

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

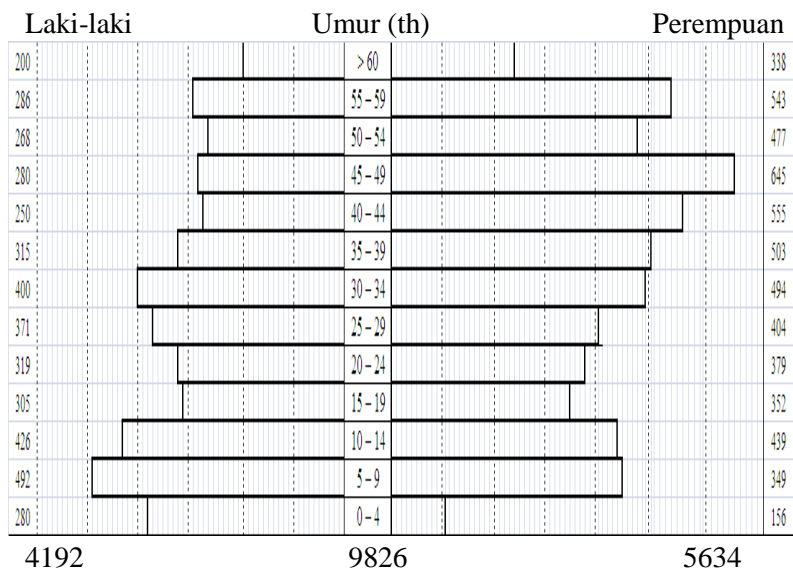
No	Kel. Umur	Laki- laki	Perempuan	Jumlah	Presentase
1	0 – 4	280	338	618	6,29%
2	5 – 9	492	543	1035	10,53%
3	10 – 14	426	477	903	9,19%
4	15 – 19	305	645	950	9,67%

⁶⁷ Dokumentasi profil Desa Tlogoboyo Bonang Demak, yang di kutip pada tanggal 22 Mei 2019

⁶⁸ Dokumentasi profil Desa Tlogoboyo Bonang Demak, yang di kutip pada tanggal 22 Mei 2019

5	20 – 24	319	555	874	8,89%
6	25 – 29	371	503	874	8,89%
7	30 – 34	400	494	894	9,10%
8	35 – 39	315	404	719	7,32%
9	40 – 44	250	379	629	6,40%
10	45 – 49	280	352	632	6,43%
11	50 – 54	268	439	707	7,20%
12	55 – 59	286	349	635	6,46%
13	≥ 60	200	156	356	3,62%
Jumlah		4192	5634	9826	100,00%

Sumber monografi Desa Tlogoboyo Tahun 2018



Gambar 3.1

Gambar Diagram Piramida Penduduk Desa Tlogoboyo Tahun 2018

Keterangan:

Laki – laki : 4192

Perempuan : 5634

Jumlah : 9826.⁶⁹

b. Kondisi penduduk menurut agama

Kondisi penduduk menurut agama di desa Tlogoboyo yaitu 100% beragama Islam, karena memang didukung dengan lembaga pendidikan agama Islam yang memadai.⁷⁰

c. Kondisi penduduk menurut mata pencaharian

Kondisi penduduk Desa Tlogoboyo berdasarkan mata pencaharian dapat peneliti gambarkan dalam tabel sebagai berikut:⁷¹

Tabel 3.2
Kondisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Petani	2571	75,7%
2	Buruh tani	59	1,7%
3	PNS / TNI / ABRI	32	0,9%
4	Pedagang	283	8,3%
5	Nelayan	453	13,3%

⁶⁹ Dokumentasi profil Desa Tlogoboyo Bonang Demak, yang di kutip pada tanggal 22 Mei 2019

⁷⁰ Dokumentasi profil Desa Tlogoboyo Bonang Demak, yang di kutip pada tanggal 22 Mei 2019

⁷¹ Dokumentasi profil Desa Tlogoboyo Bonang Demak, yang di kutip pada tanggal 22 Mei 2019

(sumber : Monografi Desa Tlogoboyo Tahun 2018)

Dari dokumen yang diperoleh diketahui bahwa mayoritas penduduk di Desa Tlogoboyo Tahun 2018 adalah berpencaharian sebagai petani, hal tersebut dibuktikan dengan letaknya di arel persawahan.⁷²

d. Kondisi penduduk menurut tingkat pendidikan

Kondisi penduduk Desa Tlogoboyo Bonang Demak berdasarkan tingkat pendidikan sebagian besar adalah tamatan Sekolah Dasar (SD) sederajat, yang menandakan bahwa tingkat kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi masih masyarakat masih kurang. Tetapi dengan adanya sekolah lanjutan tingkat pertama dan atas yang semakin banyak di era tahun 2000 memberikan peluang bagi anak – anak untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dengan biaya yang relatif murah sesuai dengan kondisi masyarakat. Adapun untuk memperjelaskan data mengenai tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: ⁷³

⁷² Dokumentasi profil Desa Tlogoboyo Bonang Demak, yang di kutip pada tanggal 22 Mei 2019

⁷³ Dokumentasi profil Desa Tlogoboyo Bonang Demak, yang di kutip pada tanggal 22 Mei 2019

Tabel 3.3
Kondisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1	Akademi / Perguruan Tinggi	129	3,6%
2	SLTA / Sederajat	328	9,1%
3	SLTP / Sederajat	375	10,4%
4	SD / Sederajat	1238	34,2%
5	Pernah Sekolah SD tapi tidak tamat	5	0,1%
6	Tidak sekolah	0	0,0%
7	Belum sekolah	1548	42,7%
Jumlah		3623	100,0%

3. Struktur organisasi Desa Tlogoboyo Bonang Demak

Struktur organisasi yang ada di Desa Tlogoboyo
Bonang Demak terlampir.⁷⁴

B. Praktik Jual Beli Kebutuhan Hajatan di Desa Tlogoboyo Bonang Demak

Manusia adalah makhluk sosial, untuk itu manusia tidak akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Seringkali manusia memiliki suatu keinginan untuk mendapatkan sesuatu, tapi tidak memiliki kemampuan dan uang yang cukup, padahal kebutuhan tersebut bersifat pokok dan mendesak. Kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh manusia adalah *sandang, pangan, papan* (pakaian, makanan, dan tempat

⁷⁴ Dokumentasi profil Desa Tlogoboyo Bonang Demak, yang di kutip pada tanggal 22 Mei 2019

tinggal). Dalam proses kehidupan masyarakat khususnya masyarakat Desa Tlogoboyo Bonang Demak, ketika seseorang akan melangsungkan hajatan baik itu khitanan maupun pernikahan ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, khususnya terkait dengan kebutuhan makanan untuk hajatan. Proses ini melibatkan seorang penjual yang menyediakan kebutuhan hajatan dan pembeli yaitu orang yang ingin melaksanakan hajatan. Baik pihak penjual maupun pihak pembeli, keduanya adalah penduduk Desa Tlogoboyo Bonang Demak. Meskipun sebagian penjual ada juga yang berasal dari daerah lain, namun sebagian besar yang menjadi penjual barang hajatan merupakan masyarakat setempat yaitu penduduk asli Desa Tlogoboyo Bonang Demak.⁷⁵

Hajatan merupakan suatu acara seperti resepsi dan selamatan. Di desa-desa hajatan identik dengan acara pernikahan, syukuran atau bancaan, dan lain sebagainya. Dalam menyelenggarakan suatu hajatan pasti membutuhkan barang-barang kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan konsumsi suatu hajatan seperti bahan-bahan makanan dan minuman yang berbagai macam jenisnya sesuai dengan jenis olahan makanan yang akan disajikan di suatu hajatan tersebut. Dalam memenuhi kebutuhan konsumsi pada suatu hajatan, masyarakat biasanya mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok seperti bahan-bahan makanan dan minuman tersebut di suatu penjual-penjual

⁷⁵ Wawancara dengan Asip Failani Rohman, Tokoh Masyarakat Desa Tlogoboyo Bonang Demak, pada tanggal 23 Mei 2019

atau warung-warung terdekatnya dengan cara membeli baik secara kontan maupun dengan hutang/pembayaran di belakangan.⁷⁶

Masyarakat Desa Tlogoboyo Bonang Demak yang akan menyelenggarakan hajatan biasanya memenuhi kebutuhan konsumsi untuk hajatannya tersebut dengan cara membeli secara tidak tunai atau pembayaran di belakangan. Ia akan mendatangi seorang penjual barang-barang kebutuhan pokok seperti penjual atau warung yang dapat menyetorkan terlebih dahulu barang yang ia butuhkan dengan pembayaran di belakang. Biasanya penjual barang-barang kebutuhan pokok tersebut sudah dikenal masyarakat sejak lama dan sering digunakan untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari.⁷⁷

Barang-barang yang termasuk jual beli hajatan adalah semua barang yang dibutuhkan oleh warga yang akan melakukan hajatan, banyak dan jenisnya barang disesuaikan dengan kebutuhan yang akan melaksanakan hajatan. Berikut bentuk barang yang dibutuhkan oleh masyarakat berdasarkan besar kecilnya kebutuhan hajatan yang diperlukan yaitu:

1. Bumbu masak meliputi: Bawang merah, Bawang putih, Kemiri, Cabai, Jahe, Kencur, Kunir, Ketumbar, Kemiri, Jahe, Kunyit dan lain-lain.

⁷⁶ Wawancara dengan Sofuroh, Masyarakat Desa Tlogoboyo Bonang Demak, pada tanggal 24 Mei 2019

⁷⁷ Wawancara dengan Sofuroh, Masyarakat Desa Tlogoboyo Bonang Demak, pada tanggal 24 Mei 2019

2. Sayuran meliputi: Kol, Kecambah, Seledri, Tomat, Buncis, dan lain-lain
3. Beras
4. Gula pasir dan gula aren
5. Minyak goreng
6. Krupuk rambak
7. Saos
8. Kecap
9. Jenis-jenis makanan ringan (dari kemasan kecil sampai yang besar perbosan atau kiloan)
10. Minuman meliputi: teh botol, aqua, ale-ale, teh gelas atau kemasan botol dan sebagainya
11. Sarimi
12. Telur
13. Emping mlinjo
14. Kantong plastik
15. Menyediakan juga makanan untuk snack kecil (snack makanan) dan snack besar (nasi kotak)
16. Menyediakan buah jika ada permintaan dari pembeli dan sebagainya.⁷⁸

Praktik jual beli barang-barang pokok untuk keperluan hajatan di Desa Tlogoboyo Bonang Demak sudah berlangsung

⁷⁸ Wawancara dengan Ulfah, pembeli kebutuhan hajatan Desa Tlogoboyo Bonang Demak, pada tanggal 3 Juni 2019 dan Wawancara dengan Mafrikhatun, Pedagang kebutuhan hajatan di Desa Tlogoboyo Bonang Demak, pada tanggal 27 Mei 2019

sejak lama, dimana barang-barang pokok hajatan yang berasal dari pihak penjual dengan pembayaran di belakangan tersebut oleh pembeli yang menyelenggarakan hajatan akan dijual kembali barang-barang tersebut kepada pihak penjual semula apabila nantinya terdapat sisa, hal tersebut dengan maksud untuk mengurangi total harga semula semua barang-barang yang harusnya dibayar oleh pembeli.⁷⁹

Dulu masyarakat yang akan menyelenggarakan hajatan namun tidak mempunyai dana yang cukup maka ia akan menggadaikan suatu benda/barang berharga untuk dapat meminjam dana berupa sejumlah uang di lembaga keuangan seperti bank-bank atau mengadaikan barang ke pegadaian untuk mencukupi kebutuhan hajatannya tersebut termasuk juga untuk membeli barang-barang keperluan hajatan yang berupa kebutuhan konsumsi hajatan. Dari pinjaman dana tersebut akan dibelikan barang-barang hajatan, sehingga pembelian barang-barang hajatan tersebut dilakukan secara lunas/kontan. Dan ketika terdapat sisa barang hajatan maka akan digunakan sendiri atau dibagikan kepada tetangga-tetangga atau menjualnya kepada siapapun yang mau membelinya, hal ini dilakukan karena tidak ada ikatan dengan salah satu pedagang yang mewajibkan menjual kepadanya karena telah diberikan hutangan kebutuhan hajatan.⁸⁰

⁷⁹ Wawancara dengan Asip Failani Rohman, Tokoh Masyarakat Desa Tlogoboyo Bonang Demak, pada tanggal 23 Mei 2019

⁸⁰ Wawancara dengan Asip Failani Rohman, Tokoh Masyarakat Desa Tlogoboyo Bonang Demak, pada tanggal 23 Mei 2019

Namum berbeda dengan sekarang yang bermula dari adanya penjual barang kebutuhan pokok termasuk juga barang kebutuhan hajatan yang mau mencukupi terlebih dahulu keperluan hajatan untuk masyarakat Desa Tlogoboyo dan sekitarnya yang tidak mempunyai dana lebih ketika akan menyelenggarakan hajatan. Sehingga dari pada masyarakat yang akan menyelenggarakan hajatan meminjam dana berupa uang dari lembaga keuangan seperti bank-bank dan lain sebagainya atau menggadaikan barang, lebih baik melakukan jual beli kepada pihak penjual kebutuhan hajatan tersebut. Selain masyarakat mendapat barang kebutuhan hajatan terlebih dahulu, juga tidak membutuhkan uang kontan untuk membayar barang kebutuhan hajatan tersebut, dan apabila setelah hajatan selesai dilaksanakan nantinya terdapat sisa barang maka barang tersebut dapat dikembalikan (dijual kembali) kepada pihak penjual semula. Dimana hal tersebut dapat mengurangi total harga barang-barang yang harus dibayar oleh pembeli yang menyelenggarakan hajatan kepada pihak penjual. Hal ini dirasa oleh masyarakat sebagai alternatif untuk menyelenggarakan hajatan jika tidak mempunyai dana yang lebih untuk mencukupinya dari pada harus meminjam ke suatu lembaga keuangan yang mengharuskan adanya benda/barang berharga sebagai jaminannya, selain itu juga masih dibebankan adanya bunga yang harus dibayarnya.⁸¹

⁸¹ Wawancara dengan Asip Failani Rohman, Tokoh Masyarakat Desa Tlogoboyo Bonang Demak, pada tanggal 23 Mei 2019

Permulaan transaksi atau akad jual hajatan ini berlangsung ketika calon pembeli datang ke penjual hajatan, seperti yang terjadi pada penjual milik Ibu Mafrikhatun. Calon pembeli mengatakan: *“Bu Mafrikhatun saya akan mengadakan hajatan pernikahan anak saya, sama beli barang kebutuhan hajatan tersebut ditokomu ”*, penjual dalam hal ini Ibu Mafrikhatun mempunyai kewenangan untuk menerima atau menolak permintaan calon pembeli tersebut. Tetapi juga terkadang penjual hajatan yang mendatangi masyarakat yang akan melaksanakan hajatan untuk menawarkan dagangannya, dan biasanya model seperti ini berlaku bagi penjual hajatan yang baru berdiri.⁸²

Bentuk akad jual beli yang dilakukan pembeli meminta barang terlebih dahulu dengan DP lalu sisanya di bayar di belakang, Tidak ada perbedaan antara jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran kontan maupun pembayaran di belakang, sedangkan penentuan harga rata-rata ditentukan oleh pedagang yang kemudian di tawar oleh pembeli. Namun ada beberapa penjual yang menentukan harga sendiri ketika pembeli tidak mampu memberikan DP.

Penjual lebih banyak berperan pada penentuan harga awal dan pihak pembeli menerima atau tidak, hal ini dikarenakan penjual menanggung resiko yang besar dari utang kebutuhan hajatan yang dilakukan oleh pihak pembeli. Karena menurut

⁸² Wawancara dengan Mafrikhatun, Pedagang kebutuhan hajatan di Desa Tlogoboyo Bonang Demak, pada tanggal 27 Mei 2019

pemaparan salah satu penjual hajatan, untuk menjadi penjual hajatan seorang penjual harus memiliki tiga modal, yaitu modal penyediaan barang, modal untuk barang yang diutangkan dan modal cadangan apabila modal awal dan modal untuk barang yang diutangkan habis. Lebih lanjut, mereka mengatakan bagi pihak penjual yang tidak kuat dalam permodalan dan tidak ulet, maka dengan cepat atau lambat akan mengalami kebangkrutan seperti yang terjadi di banyak penjual penyedia hajatan yang terdapat di Desa Tlogoboyo Bonang Demak ini. Selain itu kebiasaan yang berkembang dan telah menjadi watak masyarakat, mereka susah sekali membayar utang yang mereka punya, sehingga penjual akan terus menyediakan modal agar usahanya terus berjalan.⁸³

Setiap penjual memiliki kebijakan tersendiri dalam menjalankan usahanya untuk memenuhi kebutuhan hajatan masyarakat diantaranya. Seperti Bapak Khamdun yang melakukan proses jual beli kebutuhan hajatan di toko Bapak Khomdun dilakukan dengan si pembeli meminta barang yang dibutuhkan semua lengkap (dengan membawa nota belanja) lalu si pembeli membayar setelah hajatan selesai, tanpa DP awal dan semua modal ditanggung oleh penyedia barang, tidak ada perjanjian awal. Tidak ada perjanjian khusus, dan jika ada yang melanggar dipenyedia barang mengambil barang dari hasil hajatan contoh gula, beras, sebagai pengganti modal dengan harga yang

⁸³ Wawancara dengan Mafrikhatun, Pedagang kebutuhan hajatan di Desa Tlogoboyo Bonang Demak, pada tanggal 27 Mei 2019

disepakati bersama.⁸⁴ Jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang, rata-rata tidak ada kendala (semua pembeli membayar dengan lunas setelah hajatan), meskipun ada beberapa yang tidak membayar penuh sehingga barang yang dimiliki oleh pembeli atau pihak yang memiliki hajat di tarik untuk mengganti hutangnya. Total hasil belanjaan di pembeli rata-rata 3 juta samapai 4 jutaan.⁸⁵

Sedangkan Ibu Mafrikhatun salah satu pedagang melaksanakan proses jual beli barang hajatan dilakukan dengan memakai DP dan kekurangannya di bayar di belakang, Bentuk akad jual beli yang dilakukan meminta barang terlebih dahulu dengan DP lalu sisanya di bayar di belakang, dengan syarat barang hasil hajatan yang diperoleh dari sumbangan seperti beras, gula, rokok sebagian diminta untuk di jual kepada toko penyedia hajatan sebagai konsekuensi barang hajatan yang telah di sediakan oleh Ibu Mafrikhatun.⁸⁶ Tidak ada perjanjian khusus, tidak ada perbedaan hanya antara jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran kontan maupun pembayaran di belakang. Jika pembeli melanggar melunasi hutangnya bisa kapan saja sampai

⁸⁴ Wawancara dengan Khamdun, Pedagang kebutuhan hajatan di Desa Tlogoboyo Bonang Demak, pada tanggal 25 Mei 2019.

⁸⁵ Wawancara dengan Khamdun, Pedagang kebutuhan hajatan di Desa Tlogoboyo Bonang Demak, pada tanggal 25 Mei 2019

⁸⁶ Wawancara dengan Mafrikhatun, Pedagang kebutuhan hajatan di Desa Tlogoboyo Bonang Demak, pada tanggal 27 Mei 2019

seadanya uang. Yang terpenting barang hasil sumbangan yang diperoleh dalam hajatan di jual di toko Ibu Mafrikhatun.⁸⁷

Lain lagi yang dilakukan oleh Ibu Rodhiyah yang melakukan proses jual beli kebutuhan hajatan yang dilakukan oleh Ibu Rodhiyah adalah melayani sesuai permintaan orang yang berhajat (pembeli, modal ditanggung semua oleh penyedia dan semua pembayaran di belakang). Kebutuhan hajatan yang disediakan tergantung permintaan dari pembeli.⁸⁸ Jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang yang dilakukan oleh Ibu Rodhiyah dan pembeli atau pelaku hajatan dilakukan dengan kesepakatan semua barang yang sudah di beli bisa dikembalikan lagi apabila ada sisa banyak, dengan catatan barang yang bisa dikembalikan yang bisa diawetkan, apabila barang tidak bisa diawaetkan/mudah busuk tidak bisa dikembalikan lagi. Masalah harga tetap sama dengan harga awal (transaksi ini kalau sudah ada perjanjian). Dan untuk yang sebelumnya tidak ada perjanjian jika barang yang sudah dibeli ada sisa dan ingin dikemblikan makanan harga akan disesuaikan dengna harga modal penjual ketika membeli barang tersebut, bukan harga ketika di jual pada pembeli. Seperti contoh pembeli yang tadinya membeli barang tersebut dari penjual dengan harga semula semisal gula Rp. 20.000 maka jika dijual kembali ke

⁸⁷ Wawancara dengan Mafrikhatun, Pedagang kebutuhan hajatan di Desa Tlogoboyo Bonang Demak, pada tanggal 27 Mei 2019

⁸⁸ Wawancara dengan Rodhiyah, Pedagang kebutuhan hajatan di Desa Tlogoboyo Bonang Demak, pada tanggal 29 Mei 2019

penjual semula tersebut hanya dihargai seharga Rp. 17.000 saja atau dibawah harga semula dari harga belinya. Hal tersebut karena pihak penjual tidak maurugi, karena yang tadinya barangnya sudah dibeli namun dikembalikan lagi. Ketentuan harga yang ditetapkan oleh pihak penjual terhadap barang sisa hajatan yang dibelinya kembali tersebut rata-rata ditetapkan berdasarkan harga kulakan barang tersebut atau harga penjual membeli barang dagangannya dari pihak produsen atau agennya.⁸⁹

Sistem pembayaran jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang semua dengan modal ditanggung Ibu Rodhiyah dan pembayarannya di belakang, apabila ada keterlambatan untuk pembayaran maka tidak ada tambahan harga dan hutang pun tetap sama tidak ada tambahan bunga ketika ada kesepakatan kapan pelunasannya, namun ketika terjadi penundaaan pembayaran yang berlarut-larut maka ada penambahan 3 % dari huang tersebut karena pedagang harus menaggung resiko tidak bisa belanja banyak karena kekurangan modal yang terhutang tersebut. Namun ketika tepat waktu janji tidak ada penambahan apapun. Jika hutang tersebut sampai setahunan maka pihak penjual berhak menarik barang yang dimiliki pihak yang memiliki hajatan untuk melunasinya.⁹⁰

⁸⁹ Wawancara dengan Rodhiyah, Pedagang kebutuhan hajatan di Desa Tlogoboyo Bonang Demak, pada tanggal 29 Mei 2019

⁹⁰ Wawancara dengan Rodhiyah, Pedagang kebutuhan hajatan di Desa Tlogoboyo Bonang Demak, pada tanggal 29 Mei 2019

Sedangkan Bapak Aan melaksanakan proses jual beli barang kebutuhan hajatan pada dasarnya sama yaitu pihak pembeli datang ke toko Bapak Aan untuk akad membeli barang hajatan dengan pembayaran di belakang, atau terkadang saya mendatangi warga yang akan memiliki hajatan untuk menawarkan barang kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang. Harga setiap item barang yang di beli dengan pembayaran dengan pembayaran di belakang hanya selisih 100-200 rupiah dari barang yang dibeli secara kontan, hal ini dikarena pihak yang melaksanakan hajatan tidak modal sedikitpun, dan rata-rata masyarakat menganggapnya wajar.⁹¹ Ketika selesai hajatan pihak pembeli harus membayar barang-barang yang telah di beli tersebut sesuai nota yang telkah di beli, dan bisanya rata-rata lancar, namun ada beberapa warga yang tidak membayar utuh, maka pihak penjual akan mewajibkan pembeli untuk menjual barang hasil hajatan kepada penjual dengan harga sedikit murah selisih 100 sampai 200 dari harga pasaran, jika tidak mau maka pembeli harus memberikan kompensasi dari modal dagang yang telah di hutang tersebut 3% dari jumlah hutang, dan masyarakat sudah memakluminya.⁹²

Bentuk jual beli kebutuhan hajatan, Menurut penuturan salah satu dari pembeli, yaitu Ibu Basiroh pada dasarnya jual beli ini banyak yang berjalan normal yaitu pihak pembeli hutang dan

⁹¹ Wawancara dengan Aan, Pedagang kebutuhan hajatan di Desa Tlogoboyo Bonang Demak, pada tanggal 30 Mei 2019

⁹² Wawancara dengan Aan, Pedagang kebutuhan hajatan di Desa Tlogoboyo Bonang Demak, pada tanggal 30 Mei 2019

dibayar di belakang setelah hajatan selesai, namun ketika tidak bisa membayar sesuai kesepakatan sudah terbiasa harus menjual barang dari hasil hajatan kepada pihak penjual tidak bisa menjual yang lain, dan memang bahkan ada yang lama tidak membayar diberikan tambahan pembayaran hutang, hal itu sudah biasa, yang terpenting setiap transaksi tidak merugikan salah satu pihak. Jika terdapat barang yang tersisa maka bisa dikembalikan, Biasanya pembeli mengucapkan “nanti kalau ada sisa setelah hajatan barangnya saya kembalikan ya” dan pihak penjual mengatakan “ya” untuk tanda menyetujuinya. Atau jika diucapkan oleh pihak penjual biasanya ia akan bilang “*nanti kalau ada sisa di bawa kesini saja*” dan pembelipun mengiyakannya. cara penjual mencermati sisa barang tersebut berasal darinya atau bukan yaitu dengan melihat jenisnya, misal dengan bentuk, merk, kualitas, dan lain-lain. Apabila terdapat barang lain selain dari pihak penjual namun jenisnya sama dapat juga dijual pula ke pihak penjual, karena ketidaktahuan penjual maka dianggap barang tersebut berasal dari pihak penjual.⁹³

Dari praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak ini pihak penjual barang kebutuhan hajatan tersebut mendapatkan keuntungan selain dari keuntungan harga jual semula barang-barang yang ia setorkan kepada pembeli yang menyelenggarakan hajatan, juga mendapat keuntungan dari pengembalian barang sisa

⁹³ Wawancara dengan Basiroh pembeli kebutuhan hajatan Desa Tlogoboyo Bonang Demak, pada tanggal 1 Juni 2019

hajatan tersebut dari pembeli yang menyelenggarakan hajatan atas barang yang telah disetorkan oleh pihak penjual semula. Perhitungan dan pembayaran total barang-barang yang diminta pembeli yang menyelenggarakan hajatan untuk disetorkan terlebih dahulu tersebut yaitu dengan menghitung dahulu total semua barang-barang yang diminta tadi lalu dikurangi total harga barang-barang yang dikembalikan. Sehingga tanggungan pembeli selaku orang yang menyelenggarakan hajatan kepada pihak penjual dapat berkurang oleh total harga barang-barang yang di kembalikan (dijual kembali) ke pihak penjual. Meskipun barang-barang sisa hajatan tersebut hanya dihargai di bawah harga belinya, namun pembeli tidaklah mengapa atau tidak mempermasalahkannya karena menurutnya jika sisa barang hajatan tersebut digunakan untuk dirinya sendiri tidaklah habis sehingga lebih baik dikembalikan (dijual kembali) ke pihak penjual sebab dapat mengurangi beban harga yang harus ia bayar kepada pihak penjual.⁹⁴

Begitu juga menurut Ibu Siti Amanah bahwa jual beli kebutuhan hajaan dengan cara pembayaran di belakang sudah sangat lazim di sini, masalah harga pembeli tidak menanyakan harga-harga dari barang-barang yang ia minta tersebut kepada pihak penjual pada saat ia meminta barang untuk disetorkan terlebih dahulu kepadanya, alasan pembeli yaitu karena menurutnya pihak penjual sudah mau menyetorkan terlebih

⁹⁴ Wawancara dengan Basiroh pembeli kebutuhan hajatan Desa Tlogoboyo Bonang Demak, pada tanggal 1 Juni 2019

dahulu barang-barangnya dengan pembayaran di belakang, sehingga ia sudah merasa terbantu sebab kebutuhan konsumsi suatu hajatan tidaklah sedikit dan memerlukan biaya yang banyak. Untuk itu harga ia serahkan sepenuhnya kepada pihak penjual, berapapun yang akan ditetapkan ia hanya bisa nurut saja. masalahnya ketika ada beberapa pembeli yang tidak membayar tepat waktu menjadi kebijakan setiap penyedia hajatan berbeda yang terpenting tidak merugikan keduanya. Jika membayar dengan harga kontan rata-rata pembeli atau yang akan melaksanakan hajatan tidak mempunyai biaya yang cukup. Jika harus meminjam terlebih dahulu di lembaga keuangan seperti bank dan sejenisnya juga harus ada jaminan untuk dapat menerima pinjaman dari sana sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.⁹⁵

C. Pendapat Tokoh Masyarakat terhadap Praktik Jual Beli Kebutuhan Hajatan di Desa Tlogoboyo Bonang Demak

Menurut beberapa tokoh masyarakat dan agama Desa Tlogoboyo Bonang Demak terhadap praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak diantaranya bapak Abdul Hamid, M.Pd, menyatakan bahwa pada umumnya masyarakat Desa Tlogoboyo Bonang Demak memang banyak menggunakan praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang karena minimnya perekonomian dan biasanya transaksi ini dilakukan

⁹⁵ Wawancara dengan Siti Aminah pembeli kebutuhan hajatan Desa Tlogoboyo Bonang Demak, pada tanggal 3 Juni 2019

oleh masyarakat menengah kebawah. Akan tetapi tradisi lain di desa ini yaitu dengan sinoman barang dengan warga sekitar. Transaksi ini diperbolehkan asal tidak melanggar ketentuan syariat Islam yaitu adanya akad yang disepakati bersama, barang dagangannya bukan barang yang dilarang agama seperti najis dan harus halal, antara harga di bayar di belakang dan di bayar kontan harus sama dan tidak ada tambahan pembayaran ketika pihak pembeli tidak dapat melunasi pembayaran. Proses akad merupakan akad jual beli hutang. Jika dalam proses jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang ada penambahan harga dibanding di bayar secara kontan, maka termasuk riba dan tidak diperbolehkan.⁹⁶

Selanjutnya menurut K. Shu'bi Alwi, M.Ag, menyatakan sudah menjadi tradisi di Desa Tlogoboyo Bonang Demak dengan transaksi jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang. Dalam transaksi ini tinjauannya sah-sah saja sepanjang itu tidak terjadi keberatan bagi si penghutang atau pembeli dan penjual, dan jika memberatkan bagi si penghutang atau merugikan bagi penjual, maka hukumnya sudah menjadi tidak boleh dan akan menjadi permasalahan dikemudian hari. Proses akad adalah akad utang piutang, jika dalam praktik ini ada penambahan harga ketika melakukan pembelian dengan pembayaran di belakang dengan pembelian dengan kontan artinya seorang pembeli membeli barang seharga Rp. 100.000, - ketika dengan cara kontan dan

⁹⁶ Wawancara dengan Abdul Hamid, M.Pd, Tokoh Masyarakat Desa Tlogoboyo Bonang Demak, pada tanggal 5 Juni 2019

seharga Rp. 110.000,- ketika dengan pembayaran di belakang maka tidak diperbolehkan, begitu juga ketika ada tambahan pembayaran bagi pembeli karena tidak bisa membayar secara lunas ketika hajatan selesai sesuai kesepakatan awal, maka termasuk riba.⁹⁷

Sedangkan Bapak K. Ghufroon Salim menyatakan sebagian besar transaksi jual beli barang kebutuhan hajatan yang dilakukan di Desa Tlogoboyo Bonang Demak dilakukan dengan proses akad Qordh atau dengan hutang karena dibayar di belakang dan tidak mengandung riba karena harga yang diberikan penjual kepada pembeli baik dilakukan secara konan maupun secara di bayar di belakang sama, sehingga praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang hukunya sah-sah saja dan diperbolehkan, namun ketika melanggar ketentuan syariat Islam yaitu adanya perbedaan harga secara kontan dengan pembayaran di belakang pada barang yang diperjual belikan sama maka tidak diperbolehkan. Demikian juga apabila pembayaran yang dilakukan setelah hajatan tidak bisa dilunasi dengan tepat waktu dan pembeli memintah tambahan waktu, sedangkan penjual tidak memberikan tambahan hutang atau harga dari tambahan waktu tersebut maka tidak riba, namun sebaliknya jika tambahan waktu

⁹⁷ Wawancara dengan Shu'bi Alwi, M.Ag, Tokoh Masyarakat Desa Tlogoboyo Bonang Demak, pada tanggal 6 Juni 2019

tersebut menjadikan adanya tambahan harga atau tambahan jumlah hutang yang ditanggung pembeli maka mengandung riba.⁹⁸

⁹⁸ Wawancara dengan Ghufro Salim, Tokoh Masyarakat Desa Tlogoboyo Bonang Demak, pada tanggal 6 Juni 2019

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI HAJATAN DENGAN PEMBAYARAN DI BELAKANG
DI DESA TLOGOBOYO BONANG DEMAK**

**A. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Praktik Jual Beli
Kebutuhan Hajatan Dengan Pembayaran di Belakang di Desa
Tlogoboyo Bonang Demak**

**1. Faktor Ekonomi Praktik Jual Beli Kebutuhan Hajatan Dengan
Pembayaran di Belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak**

Ada banyak bentuk jual beli yang bisa dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya, baik itu berupa makanan, sandang maupun papan, dan banyak juga jenis transaksi usaha jual beli yang mereka lakukan, ada yang berbentuk transaksi secara langsung, atau tidak langsung. Termasuk juga yang berkembang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak terutama bagi warga yang akan melangsungkan hajatan baik itu pernikahan maupun khitanan yang membutuhkan barang-barang kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan konsumsi suatu hajatan seperti bahan-bahan makanan dan minuman yang berbagai macam jenisnya sesuai dengan jenis olahan makanan yang akan disajikan di suatu hajatan tersebut dengan sistem pembayaran di belakang.

Kalau dilihat dari awal terjadinya akad praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang di Desa

Tlogoboyo Bonang Demak yang dilakukan oleh penjual dan pembeli (dalam hal ini pihak yang akan melaksanakan hajatan), ada bentuk sebuah kesepakatan yang arahnya adalah kerelaan antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli, yaitu penjual menentukan harga barang hajatan dan pembeli menerimanya harga tersebut, atau sebaliknya. Praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak yang dilakukan pada umumnya oleh orang yang telah *Baligh* dan cukup umur untuk melakukan transaksi, konsumen/pembeli faham atas segala cara/aturan dan praktek yang telah diterapkan. Selain itu pula praktek yang dilakukan oleh semua yang mengikutinya.

Lebih lanjut apabila dianalisis dengan seksama berdasarkan pada penjelasan dari bab-bab sebelumnya, praktik jual beli barang-barang pokok untuk keperluan hajatan di Desa Tlogoboyo Bonang Demak baik dari pihak penjual kepada pihak pembeli (selaku penyelenggara hajatan) maupun penjualan kembali sisa barang-barang pokok keperluan hajatan dari pihak pembeli (selaku pihak penyelenggara hajatan) kepada pihak penjual semula, hal tersebut terdapat alasan yang mendasar adanya praktik jual beli tersebut yaitu pihak pembeli selaku yang menyelenggarakan hajatan menghendaki untuk mendapatkan dana terlebih dahulu untuk menyelenggarakan hajatannya. Sedangkan pihak penjual menginginkan keuntungan dari praktik jual beli tersebut.

Alasan terjadinya jual beli di atas tidak menyimpang dari hukum perdagangan secara umum, tetapi apabila dilihat dari segi manfaat dan madharatnya akan menimbulkan dampak ketidakadilan antar pihak, antara lain yaitu:

- a. Harga yang hanya ditetapkan oleh penjual saja tanpa kesepakatan dengan pembeli dapat merugikan salah satu pihak, terutama pihak pembelinya karena ia mau tidak mau harus setuju berapapun harga yang ditetapkan oleh pihak penjual.
- b. Ketidak adanya kesepakatan harga yang jelas dapat dijadikan peluang untuk melakukan kecurangan oleh salah satu pihak, terutama pihak penjual barang-barang kebutuhan pokok untuk hajatan yaitu memberikan harga yang lebih tinggi.

Dengan adanya dampak-dampak yang ditimbulkan oleh jual beli barang-barang keperluan hajatan tersebut, maka demi kemaslahatan jual beli yang demikian lebih baik ditinggalkan, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang artinya: “Meninggalkan kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan.” Maksud dari kaidah tersebut adalah bahwa jika terjadi pertentangan antara kerusakan dan kemaslahatan (kebaikan) pada suatu perbuatan atau jika perbuatan ditinjau dari segi terlarang, karena mengandung kerusakan dan ditinjau dari segi yang lain mengandung kemaslahatan, maka segi larangan yang harus didahulukan.

Hal ini disebabkan karena perintah meninggalkan larangan lebih kuat dari pada perintah menjalankan kebaikan.⁹⁹

Praktik jual beli ini berbeda dengan bai' inah karena dalam jual beli ini tidak terdapat kesepakatan untuk menjualnya kembali kepada penjual semula. Dalam jual beli ini, pihak penjual tidak memaksa/mengaharuskan pembeli untuk menjual kembali barang-barang tersebut kepadanya. Ia hanya memberikan saran kepada pihak pembeli selaku penyelenggara hajatan, bahwa pihak pembeli dapat menjual kembali barang-barang pokok keperluan hajatan yang sudah disetorkan tersebut kepadanya lagi. Terkait dengan harga penjualan kembali barang-barang hajatan yang hanya dihargai dibawah harga semula tersebut adalah suatu hal yang wajar. Karena oleh pihak penjual, barang tersebut akan ia jual kembali selayaknya barang dagangannya semula dengan harga yang sama pada saat ia menjualnya kepada pihak pembeli selaku orang yang menyelenggarakan hajatan. Untuk itu, pada saat ia membeli barangnya kembali dari pihak pembeli yang menyelenggarakan hajatan tersebut, ia memberikan harga yang sama pada saat ia mendapatkan barang tersebut dari produsen. Sehingga harga yang diberikan pada saat ia membeli kembali barangnya dari pihak pembeli yang menyelenggarakan hajatan dibawah harga pada saat ia menjualnya.

⁹⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos, 1996, h. 168.

Prinsip kontrak dalam hukum Islam tak ubahnya seperti perjanjian atau perikatan yang dituangkan dalam sebuah akta pada umumnya. Kontrak dalam hukum Islam dikenal dengan akad terjadi antara dua belah pihak yang didasari asas kesepakatan para pihak untuk membuat suatu perjanjian atau perikatan yang didahului penawaran (pihak penjual kebutuhan hajatan menawarkan barang kebutuhan hajatan) dan penerimaan (*Ijab-qabul*) / (pihak pembeli kebutuhan hajatan menerima barang yang ditawarkan oleh penjual) mengenai suatu objek tertentu.

Suatu kontrak atau perjanjian pada prinsipnya tetap mengacu pada norma yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHP yang terdiri dari kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan sebab yang halal. Dengan dipenuhinya empat syarat tersebut, suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.¹⁰⁰ Tim Lindsey *et al* mengartikan kontrak atau akad sebagai kesepakatan atau komitmen bersama lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Intinya, terdapat hubungan antara ijab dan kabul yang mendasari akad. Dengan demikian, akad yaitu tercapainya ijab yang dinyatakan oleh salah satu

¹⁰⁰ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, h. 1

pihak dan dilakukannya qabul dari pihak lain secara sah menurut syariah.¹⁰¹

Dalam istilah leksikal sebagaimana dikutip oleh Yulianti, akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab ialah ikatan atau simpulan baik ikatan yang nampak (*hissy*) maupun tidak nampak (*ma'nawy*).¹⁰² Kamus al-Mawrid, menterjemahkan *al-'Aqd* sebagai *contract and agreement* atau kontrak dan perjanjian. Sementara menurut pendapat pakar Hukum Islam, Subhi Mahmasaniy mengartikan kontrak sebagai ikatan atau hubungan di antara ijab dan qabul yang memiliki akibat hukum terhadap hal-hal yang dikontrakkan. Pendapat pakar lain, akad adalah satu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang berdasarkan kesepakatan atau kerelaan bersama. Rahmani Timorita Yulianti menyatakan bahwa kontrak merupakan kesepakatan bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih melalui ijab dan qabul yang memiliki ikatan hukum bagi semua pihak yang terlibat untuk melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan tersebut.

Transaksi syariah berdasarkan pada prinsip pertama persaudaraan (*ukhuwah*), transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat, sehingga

¹⁰¹ Lindsey, Tim *et al.*, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-undangan Indonesia Fikih dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, h. 259

¹⁰² Rahmani Timorita Yulianti, Asas-Asas Perjanjian Akad dalam Hukum Kontrak Syari'ah, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II, No. 1, Juli 2008, h. 92-93

seseorang tidak boleh mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain. Prinsip ini didasarkan atas prinsip saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling menolong (*ta'awun*), saling menjamin (*takaful*), saling besinergi dan saling berafiliasi (*tahaluf*).

Kedua, Keadilan (*adalah*), selalu menempatkan sesuatu hanya pada yang berhak, dalam realitas prinsip ini sesuai aturan muamalah yaitu melarang adanya unsur: Riba/bunga; Kezaliman terhadap diri sendiri, orang lain atau lingkungan; Maisir/judi atau bersikap spekulatif dan tidak berhubungan dengan produktivitasnya; Ghahar/unsur ketidakjelasan, manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad; dan Haram. Ketiga, Kemaslahatan (*maslahah*), yaitu segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan harus memenuhi dua unsur yaitu: halal (patuh terhadap ketentuan syariah) dan thayib (membawa kebaikan dan bermanfaat).

Keempat, Keseimbangan (*tawazun*), yaitu keseimbangan antara aspek material dan spiritual, antara aspek privat dan publik, antara sektor keuangan dan sektor riil, antara bisnis dan sosial serta antara aspek pemanfaatan serta pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya memperhatikan kepentingan pemilik semata tetapi memperhatikan

kepentingan semua pihak sehingga dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi tersebut.

Kelima, Universalisme (*syumuliah*), dimana esensinya dapat dilakukan oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).

Kelima, Kerelaan, (*al-Ridhâ*). Berdasarkan asas ini maka semua bentuk akad yang dibuat harus dilakukan karena kerelaan diri, bukan karena keterpaksaan atau dipaksa. Dengan demikian bila asas ini tidak terpenuhi, maka akad dapat dianggap batal atau tidak sah, dan bila keadaan itu tetap dilangsungkan maka sama artinya dengan memakan sesuatu dengan cara yang batil (*al-akl bi al-bâthil*). Singkatnya, asas ini mengharuskan tidak adanya paksaan dari pihak manapun dalam proses transaksi. Persamaan atau kesetaraan (*al-musāwah*). Kedua belah pihak yang sedang melakukan suatu akad perjanjian mempunyai kedudukan yang sama dan setara. Sehingga, pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas almusāwah ini.¹⁰³

Dari asas di atas menunjukkan ada praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak yang memenuhi asas tersebut ada

¹⁰³ Abdurrauf, *Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah, Al-Iqtishad, Vol IV*, No. Jakarta: UIN-Syarif Hidayatullah, 1, Januari 2012, h. 23

yang tidak, bagi mereka yang melakukan penambahan harga dan prosentase maka tidak terpenuhi semua asas tersebut.

Pendeknya, secara umum praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak dengan tanpa adanya tambahan dapat melestarikan nilai-nilai kebersamaan, saling menolong. Dan Islam pula mengajarkan dan menganjurkan agar sesama umat manusia hidup saling bergotong royong, tolong menolong, bantu membantu terhadap sesamanya atas dasar rasa tanggung jawab bersama.

Dan karena itu Islam menganjurkan pula agar hubungan kehidupan dalam satu individu dengan individu yang lain dapat ditegakkan atas dasar nilai-nilai keadilan, supaya dapat terhindar dari tindakan pemerasan yang tidak terpuji. Salah satu hal yang mencerminkan demikian itu adalah tidak ada proses pembohongan diantara penjual dan pembeli meskipun penjual punya hak untuk menentukan harga namun asas kesepakatan bersama lebih dipentingkan dalam Islam.

Bentuk kesepakatan di awal ketika melakukan praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak, antara penjual pembeli, dan yang jelas dengan hak dan kewajiban masing-masing telah menjadikan proses jual beli sesuai dengan aturan yang berlaku

baik dari segi agama yaitu melengkapi syarat dan rukunnya dan aturan masyarakat sekitar.

Yustika menyatakan bahwa setiap aktivitas ekonomi mempunyai struktur organisasi, meskipun sederhana. Teori ekonomi sering mengandaikan bahwa pasar dan organisasi merupakan dua bentuk struktur yang berbeda dan terpisah, pasar dianggap dapat berjalan tanpa struktur atau organisasi. Anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar, karena di dalam pasar (dalam pengertian yang luas, bukan hanya sekedar tempat bertemunya antara pembeli dengan penjual/*Marketplace*) terdapat regulasi yang disepakati bersama antar partisipannya.¹⁰⁴ Regulasi (kelembagaan) tersebut adalah isi dari organisasi (*content of organization*). Pasar bisa berjalan apabila telah dilengkapi dengan regulasi yang utuh. Pandangan tersebut berkebalikan dengan tinjauan umum yang berpandangan bahwa pasar tidak memerlukan regulasi maupun organisasi karena semuanya telah diatur oleh hukum permintaan dan penawaran, dimana sinyal harga yang akan menuntun berlangsungnya transaksi. Penawaran dan permintaan tersebut tidak membutuhkan organisasi karena sudah diatur oleh tangan-tangan tersembunyi (*invisible hand*).¹⁰⁵

¹⁰⁴ A. E. Yustika, *Ekonomi Kelembagaan Definisi, Teori, dan Strategi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008, h. 314-315

¹⁰⁵ *Ibid.*

Pihak penjual dan pembeli dalam praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak pada dasarnya kedua belah yang saling membutuhkan, penjual butuh barangnya di beli sedangkan pembeli membutuhkan barang untuk acara hajatannya, sehingga posisi penjual sebagai penawaran tidak serta merta di atas pembeli yang mampu mengendalikan harga dan kebijakan pembayaran dari barang yang dibeli pembeli.

2. Faktor Sosial Praktik Jual Beli Kebutuhan Hajatan Dengan Pembayaran di Belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak

Praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak juga membantu seseorang mewujudkan keinginannya untuk memenuhi kebutuhan warga ketika membutuhkan barang untuk kebutuhan hajatan. Tata cara pelaksanaan jual beli tersebut dengan menggunakan kata-kata yang terang, jelas dan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak, dan tidak ada kata-kata yang bermaksud untuk menipu atau membohongi. Adapun menurut kebiasaan yang berlaku pada praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak, *sighot* akad dilaksanakan secara lisan antara pembeli dan penjual seperti *Bu Mafrikhatun saya mau mengadakan hajatan nikahan anak saya, saya mau minta barang punyamu ya*”, penjual menjawab *ya*.. Kedua belah

pihak menyepakati harga dan transaksi jual beli terjadi dengan cara berhutang yang sudah dimaklumi oleh kedua belah pihak.

Dalam buku III kitab undang-undang hukum perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian sifatnya terbuka atau menganut azas kebebasan berkontrak. Jadi kesimpulannya seseorang, badan usaha atau lembaga diperbolehkan membuat perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur dalam undang – undang ataupun membuat perjanjian yang belum diatur oleh undang – undang, karena itu bisa disebut perjanjian jenis baru.

Asas kebebasan berkontrak secara umum memang asas yang baik dalam bertransaksi bisnis. Ini dimungkinkan para pihak mengikat diri, hingga berakibat tidak seimbang, dan hanya menguntungkan salah satu pihak. Adanya kelebihan dari salah satu pihak ini akan mendominasi dalam menentukan syarat-syarat perjanjian sehingga pihak lain hanya ada kesempatan untuk menerima dan menolak perjanjian yang dibebankan kepadanya. ini memang perlu diperhatikan, bahwa semua ini dapat dimungkinkan oleh asas kebebasan kepada penyewa. Pengertian sewa menyewa diatur secara jelas di dalam KUH Perdata pasal, 1548 ayat (11) yang berbunyi; “suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan atau manfaat dari suatu barang selama jangka

waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”¹⁰⁶

Saling rela antara kedua pihak yang berakad terkait dengan harga dan manfaatnya. Dalam ketentuan fiqih Islam, akad gadai di antara syarat yang harus dipenuhi adalah diketahuinya harga dan manfaat suatu obyek yang digadaikan sebagai barang jaminan.¹⁰⁷

Faktor sosial yang melatar belakang praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak, tidak lepas dari keadaan sosial Desa Tlogoboyo Bonang Demak yang tidak berbeda dengan desa-desa lainnya, sebagai daerah yang menempati wilayah pedesaan kondisi sosial budayanya masih sederhana, meskipun ada diantaranya mereka yang terpengaruh kebudayaan kota pada umumnya bagi para pemudanya yang merantau untuk bekerja, akan tetapi warga Desa Tlogoboyo Bonang Demak masih memiliki nilai sosial yang tinggi sebagai tradisi di pedesaan. Hal ini terbukti dengan adanya aktivitas-aktivitas yang dilakukan antara lain gotong-royong. Hal ini sering dilakukan oleh masyarakat seperti, memperbaiki jembatan, tempat-tempat ibadah (masjid dan mushola), membantu memasak, memasang tenda dan sebagainya ketika tetangga memiliki hajatan tanpa pamrih. Hal tersebut

h.152. ¹⁰⁶ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Inermasa, 1994,

¹⁰⁷ Muqarrabin, *Fiqih Awam*, Demak: CV. Media Ilmu, 1997, h. 150-151.

bertujuan untuk kepentingan bersama dan kemasyarakatan untuk kemaslahatan umat sehingga mereka bekerja dengan senang hati. Berangkat faktor sosial yang penuh nuansa gotong royong tersebut menjadikan adanya praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak sebagai wujud tolong menolong antar sesama masyarakat atau tetangga.

Selain itu masyarakat Desa Tlogoboyo Bonang Demak juga mempunyai solidaritas yang tinggi, bila melihat tetangga maupun kerabat yang tertimpa musibah atau kesusahan, maka mereka bersegera untuk menengok atau menolongnya, bahkan juga ikut berbela sungkawa atas musibah yang diterimanya mereka ikut menghibur, menyumbang serta mendo'akan agar musibah yang diterimanya akan berkurang kesedihannya.¹⁰⁸

Namun permasalahan terjadi ketika proses pembayaran di belakang tidak dapat dipenuhi oleh pembeli setelah melakukan hajatan, maka hal ini menjadikan setiap pedagang memiliki kebijakan yang berbeda, ada yang menunggunya sampai mampu membayar tanpa ada tambahan harga atau tambahan uang, ada yang mewajibkan pembeli menjual barang hasil hajatan kepada penjual dan ada yang memberikan harga yang berbeda sampai adanya penambahan hutang

¹⁰⁸ *Ibid*,

sampai 3% sebagai tanggungan resiko kerugian modal yang telah diberikan tidak berputar atau tidak kembali.

Dalam hal ini syari'at Islam dalam bidang muamalah memberikan prinsip-prinsip umum yang harus dipegangi, yaitu antara lain: prinsip tidak diperbolehkan memakan harta orang lain secara batil, prinsip suka sama suka yaitu tidak mengandung pemaksaan yang menghilangkan hak pilih seseorang dalam aktivitas muamalah, prinsip tidak mengandung praktek eksploitasi dan saling merugikan yang membuat salah satu pihak teraniaya dan prinsip tidak melakukan penipuan.

Dengan prinsip-prinsip umum tersebut seorang muslim akan dapat mengukur aktivitas perekonomiannya, apakah ia akan terjebak dalam kungkungan riba yang dilarang oleh agama atau tidak. Dengan demikian pihak-pihak dalam perikatan dapat bersikap secara tegas dapat menghindari *al-muamalah al-riba wiyyah*, yang dilarang dalam agama. Adapun selain prinsip-prinsip umum yang telah dikemukakan tersebut, yaitu terhadap hal-hal yang tidak dikemukakan. Secara jelas dan tegas, baik dalam Al-Qur'an atau al-sunnah, maka dapat dilakukan ijtihad.¹⁰⁹

Praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak secara umum dapat disoroti sekurang-kurangnya dari dua perspektif yang

¹⁰⁹ Abdul Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam antara Fakta dan Realita*, Yogyakarta, 2003, h. 99-101.

berbeda, yaitu dari perspektif mengenai apa yang hendak dilakukan oleh seseorang dan dari apa yang sesungguhnya dilakukan oleh seseorang, baik tindakannya sejak semula memang disengaja atau tidak.¹¹⁰ Perspektif pertama menunjukkan strategi sebagai program yang luas untuk menentukan dan mencapai tujuan. Perspektif kedua, strategi adalah pola tanggapan yang berhubungan dengan lingkungan sepanjang waktu. Dengan demikian secara tidak langsung pihak penjual berperan aktif dalam fungsi sosialnya, karena pada hakikatnya barang dijual juga memiliki fungsi sosial. Dengan memberikan kemudahan pembeli untuk dapat melaksanakan hajatan dalam usahanya mensejahterakan sebagian masyarakat.

Islam sebenarnya tidak mengharamkan seorang untuk memiliki harta dan melipat gandakannya, asalkan di peroleh dari sumber yang halal dan dibelanjakan pada haknya. Islam tidak pernah mengecam harta sebagian sikap injil mengecam kekayaan, “orang kaya tidak akan dapat menembus pintu-pintu langit, sampai seekor unta dapat menembus lubang djarum.” Bahkan Islam justru menegaskan “sebaik-baiknya harta adalah yang dimiliki oleh orang yang saleh.” Harta yang baik adalah harta yang diperoleh dari sumber yang halal, dan dikembangkan secara halal. Artinya dengan usaha legal sesuai

¹¹⁰ Fatah Syukur, *Manajemen Pendidikan Berbasis pada Madrasah*, Semarang: Al-Qalam Press, 2006, h. 70

syariat dan yang bermanfaat, baik melalui usaha pribadi secara mandiri maupun kerja sama kemitraan dengan pihak lain.

Agama Islam bukan agama yang kaku, agama Islam pun mempunyai hukum, dan pada hakeketnya diciptakan oleh Allah dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberi kemanfaatan dan menghindari kemafsadatan bagi umat manusia. Oleh karena itu Allah selaku sang Penguasa alam semesta ini melakukan suatu landasan peraturan sebagai berometer sirkulasi kegiatan muamalah yang dilakukan oleh manusia. Hal ini dilakukan agar manusia tidak mengambil hak-hak yang dimiliki oleh orang lain dengan cara-cara yang tidak direstui oleh Islam.

Dengan demikian diharapkan keadaan manusia akan lurus dengan rambu-rambu agama, serta hak yang dimiliki manusia akan tidak sia-sia dan tidak mudah hilang begitu saja, juga dengan kehadiran landasan hukum yang terlahir dalam Islam akan memotivasi manusia untuk saling mengambil manfaat yang ada diantara mereka melalui jalan yang terbaik dan diridloi oleh Allah.

3. Faktor Adat Praktik Jual Beli Kebutuhan Hajatan Dengan Pembayaran di Belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak

Masyarakat Desa Tlogoboyo Bonang Demak, sehingga cara berfikirnya pun masih bersifat tradisional. Mereka masih berpegang/ bergantung pada adat kebiasaan yang telah berlaku sejak lama. Sebagaimana proses pelaksanaan praktik jual beli

kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak ini juga disebabkan karena faktor kebiasaan/adat istiadat. Praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak sudah berlangsung sejak lama dan tidak diketahui kapan dimulainya. Sehingga menjadi adat istiadat yang berkembang dan tidak bisa untuk dihindari. Mereka menganggap bahwa pelaksanaan praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak adalah hal yang biasa, wajar, dan saling menguntungkan yang tidak ada permasalahan hukumnya. Atas dasar inilah praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak tetap berjalan sampai sekarang. Dengan melihat kondisi seperti ini, maka tidak mustahil bilamana mereka memiliki wawasan atau cakrawala pandang yang sederhana dan praktis. Segala sesuatu yang telah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat akan ditetapkan sebagai suatu hukum jika adat istiadat itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Terkadang orang yang melakukan hajatan tidak mengetahui kenapa kebiasaan jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak dilakukan, namun mereka melakukan tersebut karena mengikuti apa sudah dilakukan oleh bapakknya atau ibunya terdahulu yang telah melakukan jual beli tersebut, jadi

motifasi mengikuti kebiasaan yang telah dilakukan keluarganya terdahulu menjadi salah satu faktor penting terhadap kebiasaan masyarakat melakukan jual beli tersebut.

Sebagai sebuah cara hidup, kebudayaan tidak bisa lepas dari sistem sosial yang mencakup pranata-pranata. Pada tahap selanjutnya, sistem sosial ini akan membentuk sebuah kelompok sosial yang menghasilkan sebuah kebudayaan. Oleh karena itu, implikasi dari pelaksanaan tradisi ini bagi masyarakat adalah terciptanya sikap toleransi antara mereka yang melaksanakan, disatu sisi, dengan mereka yang tidak mau melaksanakan, disisi lain.

Fenomena yang terjadi di Desa Tlogoboyo Bonang Demak dimana melakukan pelaksanaan praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang, mengingat apa yang dilakukan dengan kebiasaan ini ternyata bisa diterima oleh masyarakat yang menjalankan kebiasaan tersebut. Lebih lanjut, mengenai tradisi atau kebudayaan ini Ralph Linton menyebutkan bahwa kebudayaan merupakan seluruh cara kehidupan dari masyarakat yang mana pun dan tidak hanya mengenai sebagian dari cara hidup mereka.¹¹¹ Pola ini dilakukan oleh masyarakat di Desa Tlogoboyo Bonang Demak dalam praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang.

¹¹¹ T.O. Ihromi ed., *Pokok-pokok Antropologi Budaya*, Jakarta: Gramedia, 1986, h. 91

Berkaitan dengan kebiasaan pelaksanaan praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang pada masyarakat Desa Tlogoboyo Bonang Demak yang merupakan sebuah kebiasaan masyarakat setempat yang telah menjadi norma sosial, maka *manfaat* dari kebiasaan ini akan lebih berimplikasi pada kehidupan sosial masyarakat yaitu terciptanya masyarakat yang harmonis dan terhindar dari pertikaian. Pada dasarnya tradisi tidak bisa dilihat secara parsial tapi harus lebih dipahami secara menyeluruh karena tradisi bukanlah sebuah produk manusia sebagai individu namun manusia sebagai masyarakat. Oleh karenanya, ketika adat yang telah menjadi norma ini dilakukan maka secara psikologi mereka akan merasa tenang dan pada dasarnya hukum diciptakan untuk menciptakan suasana damai di tengah masyarakat. Lebih jelasnya, manfaat diberlakukannya tradisi pelaksanaan praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang pada masyarakat. Desa Tlogoboyo Bonang Demak ini adalah (a) terciptanya tata kehidupan masyarakat yang harmonis, (2) terpeliharanya sikap toleransi antar masyarakat.

B. Analisis Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kebutuhan Hajatan Dengan Pembayaran di Belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak

Praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak kalau dilihat dari

awal terjadinya akad yang dilakukan oleh penjual, ada bentuk sebuah kesepakatan yang arahnya adalah kerelaan antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli, yaitu penjual menentukan harga dan pembeli menerimanya harga tersebut, atau sebaliknya. Islam mengajarkan unsur-unsur jual beli, yaitu unsur jual beli terdiri dari beberapa di antaranya:

1. Ijab (ungkapan pembeli dari pembeli)

Ijab ini diucapkan oleh pembeli kebutuhan hajatan kepada pedagang ”bu saya mau membeli kebutuhan hajatan di toko ibu”

2. Qabul (pernyataan penjual dari penjual) atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan harga antara penjual dan pembeli.

Qabul ini dilakukan oleh penjual dengan mengucapkan “ya”

3. Harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjual belikan karena barang-barang tersebut tidak bermanfaat bagi muslim.¹¹²

Harta yang diperjual belikan jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak seperti sayuran, bumbu masak, mie, rokok, dan sebagainya yang dapat memenuhi kebutuhan untuk orang yang akan melakukan acara hajatan

¹¹² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ikhtiyar Baru Van Hoeve, 1997, h. 827-828

Menurut jumhur ulama', rukun jual beli atau unsur jual beli itu ada empat yaitu:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Sighat (lafadz ijab dan qabul)
3. Mahal *al-'Aqd* atau *al-Ma'qud 'alaih* (ada barang yang dibeli)
4. Ada nilai tukar pengganti barang¹¹³

Pada kasus praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak, unsur-unsur yang ada dalam jual beli sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena keempat unsur tersebut sudah ditepati.

Akad diperlukan dalam proses jual beli untuk menguatkan jual beli, antara penjual dan pembeli agar tidak ada kesalahpahaman antara keduanya dan agar akad jual beli bisa berjalan lancar dan mempermudah penjualan. Barang sebelum diberikan kepada pembeli harus ada akadnya terlebih dahulu. Supaya pembeli tidak merasa dirugikan atau tertipu dan barang yang akan dibeli harus dijelaskan terlebih dahulu kepada pembeli mulai dari kebaikan atau keburukan barang itu.¹¹⁴

Lebih jauh disebutkan dalam akad harus ada syarat, ada kesepakatan ijab dan qabul pada barang dan kerelaan berupa barang dan harga barang, dan ini dilakukan oleh kedua belah pihak pemilik toko dan pembeli di awal *mbakol*, selain itu jenis

¹¹³ *Ibid*, h. 828

¹¹⁴ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, h. 21.

barang yang diperjual belikan dalam hajatan merupakan barang bermanfaat terutama bagi orang yang akan melakukan hajatan dan tidak ada unsur najis dan mudharat sebagaimana yang disyaratkan dalam hukum Islam karena meliputi makanan, sayuran dan sebagainya.

Kesesuaian ini dikarenakan proses jual beli yang dilakukan dalam praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak dilakukan secara transparan (ada penjual kebutuhan hajatan dan pembeli barang kebutuhan hajatan, dan keduanya melakukan akad) barang atau harta yang diperjual belikan berupa keperluan hajatan yang merupakan barang yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia akan sandang, dan itu tidak bertentangan dengan unsur jual beli.

Jual beli memiliki aturan-aturan yang bersumber dari hukum Islam yang berfungsi untuk menjaga dan menjamin hak-hak dalam kehidupan manusia, agar terhindar dari sifat dendam, menjaga kemaslahatan umum serta agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Karena pada dasarnya manusia memiliki sifat tamak dan suka mementingkan diri sendiri.¹¹⁵

Dalam Hukum Islam juga diajarkan bagaimana cara pembayaran dalam proses jual beli, sebagaimana yang terjadi pada praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di

¹¹⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, Tth, h. 268.

belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak, proses pembayaran dilakukan di belakang atau utang dengan sangat meringankan para warga karena mereka bisa melaksanakan acara hajatan tanpa mengeluarkan keseluruhan modal untuk memenuhi kebutuhan hajatan. Namun ketika ada kewajiban pembeli untuk menjual barang hasil hajatan dan adanya tambahan prosentase sekitar 3% jika tidak membayar setelah hajatan selesai atau menunggak, pada dasarnya akad utang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqridh* (pedangan kebutuhan hajatan). Misalnya persyaratan memberikan keuntungan (manfaat) apapun bentuknya atau tambahan, fuqaha sepakat yang demikian ini haram hukumnya.¹¹⁶

Menurut fuqaha Hanafiyah terdapat empat macam syarat yang harus terpenuhi dalam jual beli: (1) syarat *in'aqad*, (2) syarat *shihhah*; (3) syarat *nafadz*, dan (4) syarat *luzum*. Perincian masing-masing sebagaimana disampaikan berikut:

Syarat *in'aqad* terdiri dari:

1. Yang berkenaan dengan *'aqid*: harus cakap bertindak hukum.

Antara penjual dan pembeli barang kebutuhan hajatan di Desa Tlogoboyo Bonang Demak adalah ibu-ibu yang pasti sudah baligh.

¹¹⁶ Ghuftron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. I, 2002, h. 169

2. Yang berkenaan dengan akadnya sendiri: (a) adanya persesuaian antara ijab dan qabul, (b) berlangsung dalam majlis akad.

 Akad dilakukan antara penjual dan pembeli barang kebutuhan hajatan di Desa Tlogoboyo Bonang Demak dinyatakan dengan jelas dalam toko penjual atau rumah yang akan melakukan hajatan.

3. Yang berkenaan dengan obyek jual-beli: (a) barangnya ada, (b) berupa *mal mutaqawwim*, (c) milik sendiri, dan (d) dapat diserahkan-terimakan ketika akad.

 Barang dijual belikan adalah barang kebutuhan hajatan yang ada wujud barangnya seperti beras, tidak najis, milik dari pemilik toko penjual barang hajatan dan serah terima dilakukan secara langsung dari penjual ke pembeli baik di toko atau di rumah pembeli.

 Sedangkan syarat *shihhah*, yaitu syarat *shihhah* yang bersifat umum adalah: bahwasanya jual beli tersebut tidak mengandung salah satu dari enam unsur yang merusakannya, yakni: *jihalah* (ketidakjelasan), *ikrah* (paksaan), *tauqit* (pembatasan waktu), *gharar* (tipu-daya), *dharar* (aniaya) dan persyaratan yang merugikan pihak lain. Adapun syarat *shihhah* yang bersifat khusus adalah: (a) penyerahan dalam hal jual-beli benda bergerak, (b) kejelasan mengenal harga pokok dalam hal *al-ba'i' al-murabahah* (c) terpenuhi sejumlah kriteria tertentu

dalam hal *bai'ul-salam* (d) tidak mengandung unsur riba dalam jual beli harta ribawi.

Adapun syarat *Nafadz*, yaitu *ada* dua: (a) adanya unsur *milkiyah* atau wilayah, (b) Bendanya yang diperjualkan tidak mengandung hak orang lain. Sedangkan syarat *Luzum* yakni tidak adanya hak khiyar yang memberikan pilihan kepada masing-masing pihak antara membatalkan atau meneruskan jual beli.¹¹⁷ Kedua syarat ini dipenuhi dalam jual beli kebutuhan hajatan di Desa Tlogoboyo Bonang Demak karena barang yang diperjual belikan adalah hak penjual dan keddua belah pihak melakukan kesepakatan sehingga jika salah satu pihak tidak setuju bisa membatalkannya.

Fuqaha Malikiyah merumuskan tiga *macam* syarat jual beli: berkaitan dengan *'aqid*, berkaitan dengan *sighat* dan syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli. Syarat yang berkaitan dengan *'aqid*: (a) mumayyiz, (b) cakap hukum, (c) berakal sehat, (d) pemilik barang. Hal ini terpenuhi karena antara penjual dan pembeli dalam praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak adlah orang dewasa khusunya ibu-ibu yang pasti sudah *'aqid*

Syarat yang *berkaitan* dengan *shigat*: (a) dilaksanakan dalam satu majlis, (b) antara ijab dan qabul tidak terputus. Syarat yang berkaitan dengan obyeknya: (a) tidak dilarang oleh

¹¹⁷Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz, IV, Beirut: Darul Fikr, 1989, h. 149

syara', (b) suci, (c) bermanfaat, (d) diketahui oleh '*aqid*, (e) dapat diserahterimakan.¹¹⁸ Hal ini terpenuhi karena praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak kedua belah pihak bertemu langsung baik di toko maupun di rumah yang akan melakukan hajatan dengan barang yang dijual adalah barang halal berupa kebutuhan hajatan dan serah terima dilakukan secara langsung kedua belah pihak mengetahui

Menurut mazhab *Syafi'iyah*, syarat yang berkaitan dengan '*aqid*: (a) *al-rusyd*, yakni baligh, berakal dan cakap hukum, (b) tidak dipaksa, (c) Islam, dalam hal jual beli Mushaf dan kitab Hadis, (d) tidak kafir harbi dalam hal jual beli peralatan perang. Fuqaha Syafi'iyah merumuskan dua kelompok persyaratan: yang berkaitan dengan ijab-qabul dan yang berkaitan dengan obyek jual beli. Syarat yang berkaitan dengan ijab-qabul atau *shigat* akad:

1. Berupa percakapan dua pihak (*khithobah*)

Antara penjual dan pembeli dalam praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak melakukan transaksi di toko milik penjual

2. Pihak pertama menyatakan barang dan harganya

Penjual kebutuhan hajatan memberikan harga kepada pembeli terhadap barang-barang yang dibutuhkan.

¹¹⁸*Ibid.*, h. 387-388

3. Qabul dinyatakan oleh pihak kedua (*mukhathab*)

Antara penjual dan pembeli dalam praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak melakukan kesepakatan dengan ucapan “ya” sepakat untuk melakukan transaksi jual beli.

4. Antara ijab dan qabul tidak terputus dengan percakapan lain

Antara penjual dan pembeli dalam praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak khusus membicarakan transaksi jual beli barang kebutuhan hajatan baik barang maupun harganya, tidak ada pembicaraan lain.

5. Kalimat qabul tidak berubah dengan qabul yang baru

Antara penjual dan pembeli dalam praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak sudah sepakat dari awal pembicaraan dan pembayarannya dilakukan setelah hajatan selesai.

6. Terdapat kesesuaian antara ijab dan qabul

Antara penjual dan pembeli dalam praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak terbiasa sepakat dalam jual beli baik harga, barang yang dibeli maupun cara pembayaran.

7. Shighat akad tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain

Antara penjual dan pembeli dalam praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak

8. Tidak dibatasi dalam periode waktu tertentu

Antara penjual dan pembeli dalam praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak tidak ada batasan waktu dalam transaksi jual beli. Namun ketika adanya tambahan prosentase sekitar 3% jika tidak membayar setelah hajatan selesai atau menunggak tidak sesuai dengan syarat ijab kabul karena Akadnya dibatasi dengan periode waktu tertentu.

Syarat yang berkaitan dengan obyek jual-beli:

1. Harus suci
2. Dapat diserahkan-terimakan
3. Dapat dimanfaatkan secara syara'
4. Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya
5. Berupa materi dan sifat-sifatnya dapat dinyatakan secara jelas.¹¹⁹

Fuqaha Hambali merumuskan dua kategori persyaratan: yang berkaitan dengan *'aqid* (para pihak) dan yang berkaitan dengan *shighat*, dan yang berkaitan dengan obyek jual-beli. Syarat yang berkaitan dengan para pihak:

1. *Al-Rusyd* (baligh dan berakal sehat) kecuali dalam jual-beli barang-barang yang ringan
2. Ada kerelaan

Syarat yang berkaitan dengan *shighat*

1. Berlangsung dalam satu majlis

¹¹⁹*Ibid.*, h. 389-393.

2. Antara ijab dan qabul tidak terputus
3. Akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu

Syarat yang berkaitan dengan obyek

1. Berupa *mal* (harta)
2. Harta tersebut milik para pihak
3. Dapat diserahterimakan
4. Dinyatakan secara jelas oleh para pihak
5. Harga dinyatakan secara jelas
6. Tidak ada halangan syara.¹²⁰

Dari berbagai syarat di atas menurut beberapa imam, maka ada kewajiban pembeli untuk menjual barang hasil hajatan dan adanya tambahan prosentase sekitar 3% jika tidak membayar setelah hajatan selesai atau menunggak tidak sesuai dengan syarat ijab kabul karena Akadnya dibatasi dengan periode waktu tertentu.

Dalam Islam, hubungan pinjam-meminjam tidak dilarang bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan. Yang pada gilirannya berakibat kepada hubungan persaudaraan. Hal yang perlu diperhatikan adalah setiap orang bisa melakukan aktivitas produksi, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, pengolahan makanan, dan minuman, dan juga dapat melakukan aktivitas distribusi, seperti perdagangan. Namun, untuk memulai usaha seperti ini diperlukan modal, seberapa pun kecilnya.

¹²⁰*Ibid.*, h. 393-397.

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya: “*Hukum dasar segala yang ada itu dibolehkan kecuali ada dalil yang menunjukkan keharaman*”.¹²¹

Ketentuan hukum Islam sangatlah fleksibel dan luas, sehingga memungkinkan untuk selalu mengikuti perkembangan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa sesuatu yang sifatnya baru, namun ketentuan hukumnya tidak dijumpai dalam Al-Qur'an dan hadits maka boleh saja dilakukan. Sebagaimana yang terdapat dalam kaidah hukum Islam:

تَشْرِيعُ الْحُكْمِ فِي وَاقِعَةٍ لَا نَصَّ فِيهَا وَلَا إِجْمَاعَ بِنَاءً عَلَى مُرَاعَاةِ مَصْلَحَةٍ مُرْسَلَةٍ أَوْ مُطْلَقَةٍ

Artinya: “*Menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada nashnya atau tidak ada ijma' terhadapnya, dengan berdasarkan pada kemaslahatan semata yang oleh syara' tidak dijelaskan ataupun dilarang*”.¹²²

Kelonggaran syari'at Islam itu dimaksudkan agar Islam tetap relevan sepanjang zaman. Karena disadari bahwa kehidupan manusia sangat dinamis seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman, sehingga tidak mustahil gaya hidup manusia selalu mengalami perubahan. Begitu pula dengan hukum harus senantiasa dinamis agar tetap dipatuhi. Demikian pula dengan hukum Islam yang bersifat fiqhiyah, harus

¹²¹ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asai*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet I, 2002, h. 135

¹²² Zarkasi Abdul Salam, *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh*, Yogyakarta: LESFI, 1994, h. 115

senantiasa mengalami perubahan agar Islam tidak ditinggalkan oleh masyarakat pemeluknya.

Adakalanya orang mendapatkan modal dari simpanannya atau dari keluarganya. Ada pula yang meminjam kepada rekan-rekannya. Jika tidak tersedia, maka peran institusi keuangan menjadi sangat penting, karena dapat menyediakan modal bagi orang yang ingin berusaha.¹²³

Lebih lanjut dapat peneliti ungkapkan bahwa *Qiradh* merupakan amal baik layaknya hibah, shadaqah, dan ariyah, hak kepemilikan menjadi tetap sebab adanya akad, meskipun barang belum diterima. Boleh bagi si penghutang untuk mengembalikan barang yang sepadan dengan apa yang dia hutang ataupun mengembalikan barang aslinya. Hal ini jika tidak terjadi perubahan yang disebabkan penambahan atau pengurangan dan apabila telah berubah maka wajib mengembalikan yang sepadan

Menurut Imam Abu Hanifah, Hak kepemilikan dalam *Qiradh* menjadi kukuh dengan menerimanya. Apabila seseorang berhutang satu mud gandum dan telah menerimanya, maka orang itu mempunyai hukum menjaga barang tersebut dan mengembalikan yang sepadan meskipun yang menghutangi meminta mengembalikan barang tersebut, dikarenakan hak kepemilikan telah keluar dari yang menghutangi dan ia hanya

¹²³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute, cet. 1, 1999, h. 217.

mempunyai tuntutan dalam tanggungan orang yang dihutangi yaitu hal yang sepadan bukan asli barang tersebut.¹²⁴

Ulama Malikiyah berkata: haram mengambil manfaat dari barang milik orang yang hutang seperti contoh menaiki kendaraannya, makan dirumahnya karena sebab hutang bukan maksud memuliakan tamu, keharaman ini seperti halnya memberikan hadiah bagi orang yang menghutangi ketika pemberian tersebut dimaksudkan untuk mengakhirkan pembayaran. Dalam kondisi ini penghadiahan untuk kejadian tersebut bukan untuk hutangnya. Keharuman berhubungan dengan setiap pengambilan dan penyerahan. Oleh karenanya wajib bagi yang menerima untuk mengembalikannya, jika rusak maka wajib mengembalikan yang sepadan ataupun sama harga. Ulama Syaf'iyah dan Hambaliyah berkata: tidak diperbolehkan akad *qiradh* untuk menarik manfaat. Contoh: seseorang menghutangi seribu disertai menyuruh orang yang hutang untuk menjualkan rumahnya. Atau memerintahkan untuk mengembalikan yang lebih banyak darinya. Nabi saw melarang adanya *salf* disertai jual beli *salf* adalah *qiradh* dalam bahasa hijaz- dan diriwayat dari abi ka'ab, ibn masalah 'ud dan ibn abbas ra. Mereka melarang adanya *qiradh* yang mengambil manfaat, karena *qiradh* adalah ibadah, ketika di situ ada pengambilan manfaat maka telah melampaui batas koridor

¹²⁴ Wahbah Azzuhaily, *Al-fiqhu Al-Islami Wa-Adillah*, Juz IV, Darul Faqir, tth, hlm 723

qiradh sebagai ibadah jika manfaat berupa harta, jasa, barang, banyak maupun sedikit.¹²⁵

Maka apabila seseorang menghutangi dengan tanpa syarat dan yang dihutangi mengembalikan dengan yang lebih baik dari segi sifatnya atau menambahkan takarannya atau memberikan jasa maka boleh hukumnya. Dan tidak makruh hukumnya untuk mengambilnya. Diriwayatkan dari Abu Rofi' beliau berkata: "Nabi saw hutang *bakr* (unta) kepada seseorang, kemudian disitu ada (*ibil*) unta dari shadaqah seseorang, dan Nabi memerintahkan kepadaku untuk membayar hutang dengan *bakr*, aku berkata: "aku tidak menemukannya kecuali yang lebih baik darinya" dan Nabi kemudian berkata: "berikan padanya karena sebaik-baik kamu adalah orang yang baik dalam membayar hutang." Diriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah ra, ia berkata: "aku mempunyai hak pada diri Rasulullah, dan ia membayarnya dengan menambahi". Adapun pelarangan *qiradh* yang menarik suatu manfaat¹²⁶

Pendapat ini disepakati seiring dengan kaidah umum dalam agama dalam pengharaman atas riba. Sesuai Sabda Rasulullah Saw.:

عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً
فَهُوَ رِبَا (روه الحارث بن أبي أسامة)

¹²⁵ *Ibid.*, h. 724-725

¹²⁶ *Ibid.*, h. 726

Artinya: *"Dari Ali RA berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda; tiap-tiap hutang yang mengambil manfaat adalah termasuk riba (HR. Al Harist bin Usman)"*¹²⁷

Selain itu bentuk penyelesaian utang piutang dalam praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak di tiap penjual mengandung konsekuensi yang berbeda, diantaranya yaitu:

1. Bagi penjual kebutuhan hajatan di Desa Tlogoboyo Bonang Demak yang melakukan akad pembayaran di belakang tanpa meminta tambahan harga dan menuntut tambahan pembayaran hutang ketika ada keterlambatan, hal ini diperbolehkan dalam kajian hukum Islam, pemberian kelonggaran dan tempo yang diberikan penjual jelas lebih disarankan dalam Islam. Di dalam hukum Islam sebenarnya tidak dijelaskan secara khusus tentang wanprestasi, akan tetapi ada beberapa hadist yang terkait dengan larangan menunda pembayaran utang. Sebagai mana sabda Nabi Saw:

مَطْلُ الْعَيِّ ظُلْمٌ (روه البخارى ومسلم)

Artinya: *"Melambatkan pembayaran piutang padahal ia mampu termasuk dhalim". (HR. Bukhari Muslim).*

Di dalam hadist tersebut dijelaskan, apabila di dalam perjanjian ditentukan batas waktu pembayaran, maka

¹²⁷ Ibnu Atsir al-Jazari, *Jami' al-Ushul fi Ahadits al-Rasul Shalla Allahu Alaihi wa Sallam*, Juz awwal, Beirut: Daar al-Kutub al-'Alamiyyah, t.th, h. 387.

penghutang wajib memenuhi ketika ia sudah berkemampuan untuk melaksanakannya. Islam menganjurkan penghormatan terhadap perjanjian, karena melihat pengaruhnya yang positif dan peranannya yang besar dalam memelihara perdamaian. Kemudian menjalin hubungan dengan manusia dengan baik, menepati janji adalah wujud dari sempurnanya keadilan dan suatu lambang keadilan. Sedangkan bagi kreditur wajib memberi waktu tempo. Ketika seseorang yang berutang belum mampu melunasi utangnya sebagaimana penuturan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: *“Dan jika (orang berutang) itu dalam keadaan kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah; 280)*

2. Bagi penjual kebutuhan hajatan di Desa Tlogoboyo Bonang Demak yang akan menaikkan harga jual lebih tinggi tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pihak pembeli ketika terjadi pembayaran di belakang dan ketika terjadi keterlambatan dan kewajiban pembeli menjual barang ke penjual sebagai konsekuensi diberikan hutangan barang untuk kebutuhan hajatan dan adanya tambahan hutang 3 % karena keterlambatan dan tunggakan hutang. Menurut

hukum Islam dengan dalih apapun model seperti ini tidak boleh, karena dalam akad jual beli harus terjadi kesepakatan bersama dan saling rela, tidak boleh satu pihak memaksakan pihak yang lain. Menurut Imam Abu Hanifah, hak kepemilikan dalam *Qiradh* menjadi kukuh dengan menerimanya. Apabila seseorang berutang satu mud gandum dan telah menerimanya, maka orang itu mempunyai hukum menjaga barang tersebut dan mengembalikan yang sepadan meskipun yang mengutangi meminta mengembalikan barang tersebut, dikarenakan hak kepemilikan telah keluar dari yang mengutangi dan ia hanya mempunyai tuntutan dalam tanggungan orang yang diutangi yaitu hal yang sepadan bukan asli barang tersebut.¹²⁸

Setiap *Qiradh* harus yang mendatangkan manfaat Imam Hanafi berkata setiap piutang yang menarik manfaat hukumnya haram jika penarikan manfaat tersebut disyaratkan oleh yang mengutangi dan sama-sama mengetahui. Apabila tidak disyaratkan maka tidak apa-apa. Dengan demikian seorang yang mengutangi tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian tatkala disyaratkan oleh yang mengutangi. Jika tidak disyaratkan maka hukumnya boleh tetapi mendekati keharaman kecuali yang utang tadi mengizinkan maka baru diperbolehkan. Seperti yang tertuang dalam kitab-kitab Hanafiyah. Sebagian mereka

¹²⁸ Wahbah Azzuhaily, *Al-fiqhu Al-Islami Wa-Adillah*, Juz IV, Darul Faqir, h. 723

berkata: “Tidak halal meskipun orang yang utang (menggadaikan) memberikan izin dengan pengambilan manfaat dari barang gadai.”¹²⁹

Jika penambahan yang tidak dipersyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan di masyarakat baru boleh diterima seperti memberikan secara suka rela dari pembeli barang hajatan karena rasa terima kasih telah dibantu penjual dengan pemberian seikhlasnya. Penambahan pelunasan utang yang diperjanjikan oleh *muqtaridh* (pihak yang berutang), menurut Syafi’iyah pihak yang mengutangi makruh menerimanya, sedangkan menurut Hanabilah pihak yang mengutangi dibolehkan menerimanya.

Sebagaimana sabda Nabi SAW:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال..... كان لي عليه دين فقضاني وزادني (روه البخاري)

Artinya: “Dari Jabir bin Abdilllah ra berkata; ...dan Nabi ada utang pada saya maka beliau membayar (utangnya) padaku dan melebihkan untuku”. (HR. Bukhori).¹³⁰

Sedangkan dalam hal utang-piutang ansih (*al-qardh*) penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, hukumnya adalah haram.

¹²⁹ *Ibid*, h. 726

¹³⁰ Abdullah Ibnu Ismail Al Bukhori, *Shahih Bukhori*, Isa Babil Hlmaby Mesir, t.th., h. . 57

Hal yang paling mendasar yang perlu diperhatikan dalam transaksi praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak adalah menghindari unsur riba. Seperti kita ketahui, bahwa praktek riba sudah berlangsung jauh sebelum Islam lahir. Sejarah mencatat tidak kurang seperti Plato serta Aristoteles dari Yunani serta Cicero dan Cato dari Romawi begitu mengecam aktivitas ini. Plato berpandangan bahwa riba menyebabkan perpecahan dan menjadi ketidakpuasan di masyarakat. Selain itu menurutnya, riba merupakan alat eksploitasi golongan kaya terhadap golongan miskin. Larangan terhadap riba adalah merupakan suatu tujuan sentral dari semua ajaran moral yang ada pada semua masyarakat.¹³¹ Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”*. (QS. Ali Imran: 130)

Pendapat ini disepakati seiring dengan kaidah umum dalam agama dalam pengharaman atas riba. Sesuai Sabda Rasulullah Saw:

¹³¹ Institut Bankir Indonesia, *Bank Syari'ah: Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Djambatan, 2001, h. 45

عن علي قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً
فَهُوَ رِبَا (روه الحارث بن أبي أسامة)

Artinya: "Dari Ali r.a berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda; tiap-tiap utang yang mengambil manfaat adalah termasuk riba". (HR. Al Harist bin Usman)" ¹³²

Para ulama sepakat bahwa riba termasuk hal yang diharamkan. Imam Mawardi berkata: "Sesungguhnya riba tidak dihalalkan sama sekali dalam syari'at". Riba yang diharamkan dalam Islam ada dua macam, yaitu: *pertama*, riba *nasiah*, yaitu sesuatu yang dipungut sebab mengakhirkan tempo mengembalikan utang yang telah disepakati ke jenjang waktu yang baru, baik berupa utang maupun barang penjualan. Yang *kedua*, riba jual beli dalam macam barang: emas, perak, gandum, canthel, garam, kurma. Riba tersebut juga sering disebut riba *fadhli*. Diharamkannya dikarenakan untuk mencegah terjerumus ke hal-hal yang mengandung *mafsadah* (ke riba *nasiah*). Sebagai contoh seorang menjual emas dengan tempo tertentu untuk membayarnya, kemudian dibayarlah dengan perak dengan takaran lebih, disitu termasuk ada unsur riba.

Riba yang pertama jelas-jelas diharamkan oleh Al-Qur'an, yang mana merupakan riba orang-orang jahiliyah. Adapun macam riba yang kedua tersebut ditetapkan keharamannya dalam hadist dengan mengkiyaskan kepada riba

¹³² Al Hafidh Hadjar al-Asyqolany, *Bulughul Marom*, Surabaya: al-Hidayah, t.th., h. 176

Nasiah dikarenakan ada unsur-unsur penambahan yang tanpa ganti. Hadits juga mengharamkan model jual beli dengan tempo (tangguhan bayaran) tatkala macam barangnya berbeda, karena sangat dimungkinkan ada penambahan. Jual beli ini juga sering disebut utang yang mengambil manfaat, dikarenakan mengganti keaslian barang.¹³³

Berdasarkan hal ini, Islam mensyariatkan kerja sama penjual dan pembeli untuk kepentingan yang saling menguntungkan kedua belah pihak dan sekaligus untuk masyarakat.¹³⁴ Menurut Endy Astiwara, terdapat tiga karakteristik mendasar yang terkandung dalam riba:¹³⁵

1. Sifatnya yang berlipat ganda

Dengan adanya tambahan 3% dan barang harus sisa hasil hajatan harus di jual kepada penjual barang hajatan dengan harga ditentukan penjual.

2. Sifatnya yang menganiaya terhadap mitra bisnis.

Pembeli barang kebutuhan hajatan semakin berat membayar karena ada tambahan 3% dari hutang

3. Melumpuhkan dunia bisnis, menggerakkan sektor riil, karena bagi pihak yang memiliki dana lebih senang meminjamkan uangnya dari pada berpikir dan bekerja keras membanting tulang.

¹³³ Wahbah Azzuhaily, *Al-fiqhu Al-Islami Wa-Adillah*, h. 727

¹³⁴ Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and Genera Konsep dan sistem Operasional*, Jakarta: Gema insani, 2004, h. 138.

¹³⁵ *Ibid*, h. 141.

Penjual memanfaatkan ketidakmampuan dari pembeli kebutuhan hajatan yang tidak mampu membayar pembayaran barang yang dibeli setelah hajatan selesai, sehingga harus memberikan tambahan 3%, padahal dimungkinkan ketidakmampuan tersebut karena sumbangan dari warga atau saudara tidak rame sehingga kekurangan uang untuk membayar.

Menurut peneliti, diharamkannya kewajiban menjual hasil hajatan kepada pemberi hutang dalam hal ini pembeli, adanya tambahan harga dan tambahan proses tase dari hutang yang ditunda yang termasuk riba karena perbuatan tersebut tidak sesuai dengan prinsip Islam, yaitu menyuruh umatnya untuk saling menolong dengan sesama, tanpa mengharapkan imbalan. Islam juga menghendaki kerelaan dan kesenangan timbal balik, yaitu antara debitur dan kreditur, sedangkan riba hanya mementingkan pihak kreditur, sedangkan pihak yang lain dirugikan.

Lebih dari itu kelemahan dari praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak adalah tidak ada perjanjian tertulis dan hanya dengan unsur saling percaya, sehingga menimbulkan banyak madlarat bagi kedua belah pihak. Sebagaimana Firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُتُبْ بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menulisnya dan hendaklah seseorang penulis diantara kamu menuliskanya dengan benar”*. (QS al-Baqarah: 282).¹³⁶

Dengan perjanjian secara tertulis akan mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak ada yang dirugikan dimasa mendatang. Islam dengan ajarannya melarang praktek riba, karena di dalam riba terdapat unsur pemerasan yang sangat kejam dan dapat menyengsarakan orang lain, terutama bagi pihak peminjam atau yang berpiutang.

¹³⁶ Departemen Agama RI, *AlQuran dan Terjemah*, yayasan penyelenggara penerjemahan Al-Quran, Jakarta, 1983, h. 70

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil:

1. Faktor yang melatar belakangi praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak dilatar belakangi oleh tiga faktor yaitu faktor ekonomi berupa adanya kebutuhan akan barang untuk hajatan oleh pembeli dan menjual barang hajatan oleh pembeli, sehingga adanya permintaan dan penawaran, faktor sosial berupa adanya sikap saling tolong menolong dan gotong royong diantara masyarakat, dan faktor adat berupa kebiasaan masyarakat yang telah melakukan praktik bertahun-tahun lamanya dan mengikuti praktik yang telah dilakukan saudaranya di masa lalu, praktik ini dilakukan mulai dari pihak pembeli mendatangi penjual untuk membeli kebutuhan hajatan dengan cara pembayaran di belakang, baik ada yang dengan DP terlebih dahulu lalu kekurangannya setelah hajatan selesai atau tanpa DP sama sekali, jika terdapat sisa barang yang dibeli maka dikembalikan kepada penjual dan dihargai dengan harga modal penjual.
2. Praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak menurut hukum

ekonomi syariah adalah sah karena sesuai dengan syarat dan rukun jual beli, namun apabila karena pembelian barang hajatan dengan pembayaran di belakang mengakibatkan adanya tambahan harga dari pada di beli secara kontan, atau adanya kewajiban pembeli untuk menjual hasil hajatan kepada penjual dan adanya tambahan karena tidak membayar setelah hajatan selesai atau karena adanya tunggakan hutang tanpa kesepakatan maka haram hukumnya karena menjurus kepada riba, namun masih ada satu penjual yang tidak memberikan tambahan pembayaran dari harga awal dan tidak mewajibkan penjualan barang siswa hajatan kepadanya dikarenakan pembeli tidak mampu membayar lunas ketika hajatan selesai sesuai kesepakatan awal, maka sah dan diperbolehkan karena tidak ada unsur riba.

B. Saran-Saran

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini, maka peneliti hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi semua muslim yang melakukan proses jual beli harus mengutamakan kejujuran dan menghindari jual beli haram yang tidak bermanfaat bagi orang lain juga melanggar hukum agama.
2. Bagi penjual dalam jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak, untuk mengimplementasikan sistem penjualan yang

berdasarkan hukum Islam dengan tidak menimbulkan unsur riba dan pemaksaan pada proses jual beli yang dilakukan.

3. Bagi pihak pembeli untuk bertanggung jawab atas segala tanggungan yang dimiliki, karena Islam mengajarkan untuk tidak menunda-nunda pembayaran utang.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berada di tangan pembaca ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu, peneliti dengan kerendahan hati mengharap saran konstruktif demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Terakhir kalinya, peneliti memohon kepada Allah SWT. agar karya sederhana ini dapat bermanfaat, khususnya bagi pribadi peneliti umumnya untuk semua pemerhati ekonomi Islam. *Wa Allahu A'lam.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrauf, *Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah, Al-Iqtishad, Vol IV*, No. Jakarta: UIN-Syarif Hidayatullah, 1, Januari 2012
- Ali, A. Mukti, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*, Jakarta: RaJawali Pers, t.th
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute, cet. 1, 1999
- Arief, Abdul Salam, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam antara Fakta dan Realita*, Yogyakarta, 2003
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012
- Asqalani, Al-Hafid Ibn Hajar al-, *Bulughul Maram*, Mesir: an-Nasr Sirkah an-Nur Asia, t.th
- Asyqolany, Al Hafidh Hadjar al-, *Bulughul Marom*, Surabaya: al-Hidayah, t.th
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Azzuhaily, Wahbah, *Al-fiqhu Al-Islami Wa-Adillah*, Juz IV, Darul Faqir, tth
- Bakry, Nadzar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asal-asas Hukum Mua'malat Hukum Perdata Islam*, Cet Ke-2, Yogyakarta, UII Press, 2004

- Bukhari, Al-, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th
- Chapra, M Umer, *Sistem Moneter Islam*, Terj. Ikhwan Abidin B, Jakarta : Gema Insani Pers, 2000
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 2006
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang: Toha Putra, 2006
- , *Fiqh*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Agama, 2000
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka Jakarta, 2005
- Dewi, Gemala dan Widyaningsih, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Grop, 2005
- Dewi, Gemala, *et.al.*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Djamal, Abdul, *Hukum Islam*, Badung: CV. Mandar Maju, 1992
- Djazuli, *Ilmu Fiqh; Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2005
- Hadimulyo, Drs., dan Shobahusurur, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: CV. Adi Grafika, 1992
- Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2007
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Husaini, Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, Juz I, Semarang: PT. Karya Toha Putra, t.th

- Iman, Ghozali Said, dan Zaidun, A., *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995
- Institut Bankir Indonesia, *Bank Syari'ah: Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Djembatan, 2001
- Jazari, Ibnu Atsir al-, *Jami' al-Ushul fi Ahadits al-Rasul Shalla Allahu Alaihi wa Sallam, Juz awwal*, Beirut: Daar al-Kutub al-'Alamiyyah, t.th
- Jurjawi, Syekh Ali Ahmad, *Hikmah Al-Tasyri' wa Falsafatuhu, terj. Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: Asy-Syifa, 1992
- Kansil, C. S. T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Lindsey, Tim *et al.*, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-undangan Indonesia Fikih dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
- Ludjito, *Susunan Masyarakat Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, t.th
- Mahmassani, Sobhi, *Filsafat Hukum Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, Bandung: al-Ma'arif, 2000
- Manzūr, Ibnu, *Lisān al- 'arab*, Beirut: Dār al Kutub al 'ilmiyah, 1406 H, juz 7,H
- Maraghi, A. Musthafa al-, *Terj. Tafsir al-Maraghi*, Juz V, Semarang: Toha Putra, 2003
- Mas'adi, Ghufroon A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Moleong, Lexy. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2010

- Mubarak, Jaih, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asai*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet I, 2002
- Muqarrabin, *Fiqh Awam*, Demak: CV. Media Ilmu, 1997
- Nawawi, Hadari dan Hadari, Martini, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah klasik dan kontemporer*, Bogor :Ghalia Indonesia, 2012
- Nawawi, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996
- Pasaribu, Chairuman dan Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Quthb, Sayyid, *Tafsif fi Dzhalil Qur'an*, Jilid I, Jakarta: Gema Insani Press, 2000
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: At-Tahiriyah , t.th
- Rifa'i, Moh., *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: CV. Thoaha Putra. 1978
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Darul Fikr, t.th
- Salam, Zarkasi Abdul, *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh*, Yogyakarta: LESFI, 1994
- Shiddieqy, Hasbi Ash, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001
- , *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005

- Soenarjo, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 2004
- Subagyo, Joko P *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Inter Masa, t.th
- , *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Inermasa, 1994
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Sula, Syakir, *Asuransi Syariah Life and Genera Konsep dan sistem Operasional*, Jakarta: Gema insani, 2004
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Syafii, Rachmad, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006
- Syukur, Fatah, *Manajemen Pendidikan Berbasis pada Madrasah*, Semarang: Al-Qalam Press, 2006
- Thalib, M., *Bunga Bank Dalam Persoalan Dan Bahayanya Bagi Masyarakat*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993
- Usmani, Maulana Taqi, *Musyarakah & Mudharabah Some Issues Involved In Murabahah Islamic Finance*, <http://www.darululoomkhi.edu.pk/fiqh/islamicfinance/issuemura-baha.html>

- Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*, Bandung: CV. Diponegoro, 1992
- Yahya, Mukhtar dan Rahman, Fatchur, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, cet. I, Bandung: Al Ma'arif, 1986
- Yulianti, Rahmani Timorita, "Asas-Asas Perjanjian Akad dalam Hukum Kontrak Syari'ah", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II, No. 1, Juli 2008
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: YPPP Al Quran , 1990
- , *Tafsir Qur'an Karim*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 2004
- Yustika, A. E., *Ekonomi Kelembagaan Definisi, Teori, dan Strategi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008
- Zuhaily, Wahbah Al, *Fiqih Shaum, I'tikaf dan Haji*, Bandung : CV. Pustaka Media Utama, 2006

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asip Failani Rahman

Umur : 29 Tahun

Pekerjaan : Kepala Desa

Menerangkan bahwa :

Nama : Ain Ainul Hurroh

Nim : 132311135

Fak / Jur : Syariah Dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 23 Mei 2019

Responden/ Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aan

Umur : 54 Tahun

Pekerjaan : Pedagang

Menerangkan bahwa :

Nama : Ain Ainul Hurroh

Nim : 132311135

Fak / Jur : Syariah Dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 30 Mei 2019

Responden/ Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Khamid, M.Pd

Umur : 47 Tahun

Pekerjaan : Guru

Menerangkan bahwa :

Nama : Ain Ainul Hurroh

Nim : 132311135

Fak / Jur : Syariah Dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 6 Juni 2019

Responden/ Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Basiroh

Umur : 63 Tahun

Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa :

Nama : Ain Ainul Hurroh

Nim : 132311135

Fak / Jur : Syariah Dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 1 Juni 2019

Responden/ Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ghufroon Salim

Umur : 60 Tahun

Pekerjaan : Guru TPQ

Menerangkan bahwa :

Nama : Ain Ainul Hurroh

Nim : 132311135

Fak / Jur : Syariah Dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 6 Juni 2019

Responden/ Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khamdun

Umur : 42 Tahun

Pekerjaan : Pedagang (Toko Sembako)

Menerangkan bahwa :

Nama : Ain Ainul Hurroh

Nim : 132311135

Fak / Jur : Syariah Dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 25 Mei 2019

Responden/ Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mafrikhatun

Umur : 60 Tahun

Pekerjaan : Pedagang

Menerangkan bahwa :

Nama : Ain Ainul Hurroh

Nim : 132311135

Fak / Jur : Syariah Dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 27 Mei 2019

Responden/ Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rodhiyah

Umur : 60 Tahun

Pekerjaan : Pedagang

Menerangkan bahwa :

Nama : Ain Ainul Hurroh

Nim : 132311135

Fak / Jur : Syariah Dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 29 Mei 2019

Responden/ Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Amanah

Umur : 59 Tahun

Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa :

Nama : Ain Ainul Hurroh

Nim : 132311135

Fak / Jur : Syariah Dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 3 Juni 2019

Responden/ Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sofuroh

Umur : 39 Tahun

Pekerjaan : Pedagang Obat Pertanian

Menerangkan bahwa :

Nama : Ain Ainul Hurroh

Nim : 132311135

Fak / Jur : Syariah Dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 24 Mei 2019

Responden/ Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Su'bi Alwi, M.Ag

Umur : 47 Tahun

Pekerjaan : Guru

Menerangkan bahwa :

Nama : Ain Ainul Hurroh

Nim : 132311135

Fak / Jur : Syariah Dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 6 Juni 2019

Responden/ Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ulfah

Umur : 41 Tahun

Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa :

Nama : Ain Ainul Hurroh

Nim : 132311135

Fak / Jur : Syariah Dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 3 Juni 2019

Responden/ Narasumber



**PENELITI MELAKUKAN WAWANCARA DENGAN ASIF
FAELANI RAHMAN KEPALA DESA TLOGOBOYO KEC.**



**PENELITI MELAKUKAN WAWANCARA DENGAN ASIF
FAELANI RAHMAN KEPALA DESA TLOGOBOYO KEC.**



**PENELITI MELAKUKAN WAWANCARA DENGAN
ABDUL HAMID TOKOH MASYARAKAT TLOGOBOYO**



**STRUKTUR ORGANISASI DESA TLOGOBOYO KEC.
BONANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN BONANG
DESA TLOGOBOYO**

Jl. Gocino Wetan Rt.04 Rw.02 Bonang Demak, Kode Pos 59552

No. Kode Desa 2015

SURAT KETERANGAN
Nomor : 045.2 / 381 / VII / 2019

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Nomor : B-1975/Un.10.1/D1/TL.01/5/2019, hal : Izin Mengadakan Penelitian tertanggal 20 Mei 2019, maka Kepala Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dengan ini menerangkan nama mahasiswa/i di bawah ini :

- | | |
|------------|-------------------------|
| 1. Nama | : Ain Ainul Hurroh |
| 2. NIM | : 132311135 |
| 3. Jurusan | : Hukum Ekonomi Syariah |
| 4. Prodi | : Muamalah |
| 5. Jenjang | : S1 |

Benar telah mengadakan penelitian di Desa Tlogoboyo Kec. Bonang Kab. Demak pada tanggal 20 Mei 2019 s/d 05 Juli 2019 guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kebutuhan Hajatan Dengan Pembayaran di Belakang (Studi Kasus di Desa Tlogoboyo Kec. Bonang Kab. Demak)"**.

Demikian Surat Keterangan diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Tlogoboyo, 05 Juli 2019

Kepala Desa Tlogoboyo


ASIP FAILANI ROHMAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ain Ainul Hurroh
Tempat/Tanggal Lahir : Demak, 15 Juli 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Orang Tua
 Nama Bapak : Muzammil
 Nama Ibu : Istiqomah
Agama : Islam
Alamat : Dukuh. Morosobo RT 01 RW 03 Desa.
 Tlogoboyo Kec. Bonang Kab. Demak
Kewargangaraan : Indonesia
Jenjang Pendidikan :
1. TK Kusuma Bhakti Tlogoboyo, lulus tahun 1999
2. SDN Tlogoboyo 01, lulus tahun 2005
3. MTs Tanwirudh Dholam Kalikondang Demak, lulus tahun 2008
4. MA Takhassus Al-Quran Sragen Bonang Demak, lulus tahun 2012
5. UIN Walisongo Semarang, lulus tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya
untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 24 Juli 2019
Hormat Saya

AIN AINUL HURROH
NIM. 122311097

